



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

LMCK

20
24

Laporan Monitoring Capaian Kinerja **Triwulan IV**



BPTD Kelas II Sumatera Selatan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Nur Ida Fitrianti	Penyusun Rencana dan Pelaporan	20 /01/2025	
2.	Diperiksa	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	20 /01/2025	
3.	Disetujui	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	20 /01/2025	
4.	Disetujui	Yuliana Y.S. Panjaitan	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	20 /01/2025	
5.	Disetujui	Milfer Joneliy, S.Kom., M.Si.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	20 /01/2025	
6.	Disetujui	Herry Saputra, S.SiT., M.Si.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	20 /01/2025	



KATA PENGANTAR

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN



BPTD Kelas II Sumatera Selatan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, BPTD Kelas II Sumatera Selatan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II BPTD Kelas II Sumatera Selatan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV BPTD Kelas II Sumatera Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Palembang, 20 Januari 2025

**KEPALA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT KELAS II
SUMATERA SELATAN**

**NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002**





RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024 mengusung Visi "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam mendukung visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu Kementerian Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1 – Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP 2 – Infrastruktur Ekonomi, dan PP 3 – Infrastruktur Perkotaan, melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut: 1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1); 2. KP – Konektivitas Kereta Api (PP 2); 3. KP – Konektivitas Laut (PP 2); 4. KP – Konektivitas Udara (PP 2); 5. KP – Konektivitas Darat dan Antarmoda (PP 2); dan 6. KP – Transportasi Perkotaan (PP 3).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu: Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong". Renstra memuat 3 (tiga) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan per 10.000 keberangkatan.





Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2024, terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2024. Terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 100,0 (target 100,0);
2. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 7,0 (target 7,0);
3. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 6,0 (target 6,0);
4. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A sebesar terealisasi sebesar 29,87 (target 25,0);
5. Persentase penerapan SMART terminal tipe-A terealisasi sebesar 51,42 (target 55,0);
6. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP terealisasi sebesar 60,13 (target 60,0);
7. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 79,10 (target 80,0);
8. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 18,83 (target 16,0);
9. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 1300,0 (target 840,0);
10. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 76,50 (target 82,0);
11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 90,0 (target 95,0); dan
12. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 85,0 (target 85,0).

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kegiatan adalah sebesar 104,0%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	2
I.1 Latar Belakang	2
I.2 Sumber Daya Manusia	5
I.3 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	5
I.4 Sistematika Laporan	10
I.5 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	14
BAB II TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	25
II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	25
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	27
SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI	
IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional	29
a.1 Definisi Indikator Kinerja	29
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	30
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	30
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	32
IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	32
a.1 Definisi Indikator Kinerja	32
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	33
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	34
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	35
IKK. 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	32
a.1 Definisi Indikator Kinerja	35
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	36

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	36
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	38
SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATKAN PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT	
IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A.....	38
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	38
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	41
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	41
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	44
IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	44
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	44
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	44
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	45
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	47
IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	48
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	48
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	49
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	50
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	52
IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.....	52
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	53
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	54
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	54
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	56
IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	56
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	56
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	57
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	58
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	60
IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.....	60
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	60
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	60

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	61
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	63
IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	63
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	63
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	63
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	64
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	66
IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	66
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	66
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	67
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	68
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	70
SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT AKUNTABEL	
IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	70
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	70
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	71
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	72
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	74
II.3 REALISASI ANGGARAN	75
II.2.1.1 Pagu Anggaran	75
II.2.1.2 Revisi Anggaran Tahun 2024.....	76
II.2.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2024	78
II.2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024	80
II.2.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	80
II.2.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024.....	81
II.2.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024	82
II.2.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja	84
II.2.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	85
II.2.4 Hambatan dan Kendala	86

PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Selatan sesuai Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024	14
Tabel I.2	Rencana Kinerja Tahun 2024	16
Tabel I.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
Tabel I.4	Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
Tabel I.5	Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
Tabel II.1	Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2024	28
Tabel II.2	Realisasi Ritase Keperintisan Angkutan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan	32
Tabel II.3	Aspek Penilaian Persentase Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A (Aspek Keselamatan, Keamanan, dan Keandalan/Keteraturan)	39
Tabel II.4	Aspek Penilaian Penerapan SMART Terminal Tipe A	47
Tabel II.5	Aspek Penilaian Persentase SPM (Standar Pelayanan Minimum) di Pelabuhan SDP	49
Tabel II.6	Asumsi Pembobotan Pemenuhan Item Perlengkapan Jalan	53
Tabel II.7	Realisasi Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Pada Triwulan IV Tahun 2024	56
Tabel II.8	Aspek Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	67
Tabel II.9	Hasil Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	69
Tabel II.10	Aspek Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	71
Tabel II.11	Hasil Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	73
Tabel II.12	Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024	74
Tabel II.13	Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024	74
Tabel II.14	Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan IV Tahun 2024	74

Tabel II.15	Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan IV Tahun 2024	74
Tabel II.16	Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024	77
Tabel II.17	Rincian Revisi per Jenis Belanja Tahun 2024	78
Tabel II.18	Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024	79
Tabel II.19	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2024	79
Tabel II.20	Kegiatan Program Yang Ada Dalam DIPA Tahun 2024	82
Tabel II.21	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2024	82
Tabel II.22	Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan IV Tahun 2024	83
Tabel II.23	Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024	85
Tabel II.24	Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024	85
Tabel II.25	Efisiensi Anggaran	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Grafik Capaian IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional	26
Gambar II.2	Grafik Capaian IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	30
Gambar II.3	Grafik Capaian IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	33
Gambar II.4	Grafik Capaian IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	38
Gambar II.5	Grafik Capaian IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	42
Gambar II.6	Grafik Capaian IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	47
Gambar II.7	Grafik Capaian IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	53
Gambar II.8	Grafik Capaian IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	56
Gambar II.9	Grafik Capaian IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	60
Gambar II.10	Grafik Capaian IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	63
Gambar II.11	Grafik Capaian IKK5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	68
Gambar II.12	Grafik Capaian IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	72
Gambar II.13	Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2024	78
Gambar II.14	Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan IV Tahun 2024	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 4. Rencana Aksi Tahun 2024

Lampiran 5. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024





BAB I

Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, *Transparan*, *Akuntable*, *Efektif* dan *Efisien* sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.



I.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat semula terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2023, terdapat perubahan nomenklatur dan pemecahan Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Tipologi (BPTD) terdiri atas:

1. BPTD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal untuk barang umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan disebut BPTD Kelas I;
2. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas II;
3. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas III;

Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Prasarana;
3. Bidang Sarana dan Angkutan;
4. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

I.1.2 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat



Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, sub bagian, satuan pelayanan dan kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

A. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

B. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, danau dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

C. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan

dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

D. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

I.2 Sumber Daya Manusia

Data sumber daya manusia pada satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan pada Tahun 2024 meliputi:

- A. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 197 Orang;
- B. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 15 Orang;
- C. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4 Orang; dan
- D. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 259 Orang.

I.3 Potensi Isu Strategis Permasalahan

I.3.1 Potensi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagai unsur pembantu pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan

dan pemberian dukungan kepada pemerintah daerah. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan di bidang transportasi darat. Potensi pengembangan pada bidang transportasi darat adalah sebagai berikut:

- A. Dalam fenomena perkembangan globalisasi, tingkat pelayanan transportasi darat akan terus diupayakan untuk memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global;
- B. Teknologi transportasi darat akan berpengaruh terhadap kapasitas angkut, fleksibilitas pergerakan, kecepatan waktu tempuh, dan bentuk serta kehematannya dalam mengkonsumsi bahan bakar;
- C. Dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan melalui kebijakan deregulasi akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi darat, serta akan memperluas jangkauan;
- D. Dengan melakukan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka akan meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dalam dunia internasional dan meningkatkan citra bangsa. Pembangunan transportasi darat berkelanjutan dapat dilakukan secara konsisten, misalnya mewajibkan melakukan studi AMDAL sebelum masa konstruksi bagi setiap program pembangunan transportasi darat yang telah disetujui pendanaannya. Selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca operasi secara berkala oleh Lembaga-lembaga yang telah ada. Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dapat disinergikan menjadi kekuatan yang efektif.

I.3.2 Isu Strategis

- A. Membangun Konektivitas Nasional untuk keseimbangan pembangunan Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antar wilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat gerak ekonomi. Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional:

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung Kerjasama regional dan global;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Lembaga pengembangan sumber daya manusia.

B. Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdayasaing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan LRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakandan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah:

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

I.3.3 Permasalahan

A. Permasalahan Transportasi Angkutan Jalan

1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan, belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan pedesaan.
2. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari :
 - a. Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal dikarenakan belum semua jembatan timbang beroperasi;
 - b. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan yang rendah; rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
 - c. Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat:
 - a) Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
 - b) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;
 - c) Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien;
3. Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
 - a. Belum terpadunya tatanan transportasi nasional dan wilayah;
 - b. Masalah pendidikan dan *law enforcement* peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan.

Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelanggaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- c. Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
- d. Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.
- e. Permasalahan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - a) Belum ada data yang lengkap mengenai peta alur pelayaran sungai danau;
 - b) Terbatasnya jumlah SDM sehingga pelaksanaan Monitoring dan Pengumpulan Data Transportasi SDP di daerah kurang optimal;
 - c) Belum dilaksanakan penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - d) Belum ada buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.
- f. Permasalahan Transportasi Perkotaan
 - a) Kurangnya panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;
 - b) Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan;
 - c) Kurang jelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;

- d) Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi;
- e) Kemacetan lalu lintas;
- f) Pelayanan angkutan umum belum memadai;
- g) Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.
- g. Permasalahan Keselamatan Transportasi Darat
 - a) Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia;
 - b) Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan;
 - c) Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan;
 - d) Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program-program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.

I.4 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan IV Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

A. SP1.....

- Uraian Sasaran Program

A.1. IKP1

A.1.1 Definisi Indikator Kinerja

A.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

A.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.1.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2024

A.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

A.2. IKP 2

A.2.1 Definisi Indikator Kinerja

A.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

A.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.2.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.2.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2022

A.2.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

- Uraian Sasaran Program

B.1. IKP 1

B.1.1. Definisi Indikator Kinerja

B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2022

B.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

B.2. IKP 6

B.2.1. Definisi Indikator Kinerja

B.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

B.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

B.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2022

B.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

B.3. IKP 7

B.3.1. Definisi Indikator Kinerja

B.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

B.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

B.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2022

B.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

B. SP3.....

- Uraian Sasaran Program

C.1. IKP 1

C.1.1. Definisi Indikator Kinerja

C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2022

C.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

C.2. IKP2

C.2.1. Definisi Indikator Kinerja

C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2022

C.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

II.3 Pengukuran Capaian Kinerja

III.3.1Alokasi Anggaran Tahun 2024

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2024

III.3.2Realisasi Anggaran Tahun 2024

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.4 Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. Rencana Aksi Tahun 2024;
4. Lain – lain yang dianggap perlu.

I.5 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program BPTD Kelas II Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, BPTD Kelas II Sumatera Selatan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program BPTD Kelas II Sumatera Selatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel I.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Selatan sesuai Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET 2020-2024	TARGET 2024
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0	1
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	7
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	0	7
						6
SK2	Meningkatnya pelayanan	IKK2.1	Persentase pelaksanaan	%	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET 2020-2024	TARGET 2024
transportasi darat		Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A				
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0	60	65
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	100
SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat		IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	80	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	20	10	13
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0	1	0
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	1200	1300
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100	100
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	25	1	1
SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis		IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	90	90

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET 2020-2024	TARGET 2024
Transportasi Darat							
WA		PROGRM DUKUNGAN MANAJEMEN					
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	85	85

I.5.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan BPTD Kelas II Sumatera Selatan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat.

Tabel I.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	80
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

I.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran **Rp. 176.330.836.000,-** adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	80
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan**Anggaran**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	33.114.165.000,-
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	70.208.755.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	31.663.460.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	6.136.352.000,-
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	109.000.000,-
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.671.393.000,-
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	29.427.711.000,-

I.7 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun berjalan terjadinya perubahan Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan, perubahan anggaran serta terdapat Indikator Kinerja Kegiatan yang targetnya berubah, maka dilakukan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang sebagaimana dari Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut menyesuaikan dengan Rencana Strategis 2020 – 2024.

Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Selatan melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan total anggaran Rp. 176.330.836.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*) adalah sebagai berikut:

Tabel I.4 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	80

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan**Anggaran**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	33.215.165.000,-
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	70.208.755.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	31.663.460.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.696.512.000,-
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	109.000.000,-
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.671.393.000,-
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	26.580.191.000,-

I.1 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dengan terjadinya perubahan nomenklatur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai PM 12 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perubahan pimpinan dan perubahan anggaran, maka mengakibatkan disesuaikannya kembali Perjanjian Kinerja pada tanggal 04 Desember 2024.

Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan total anggaran Rp. 176,090,836,000,- (*Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*) adalah sebagai berikut.

Tabel I.5 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	60

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan**Anggaran**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	31.389.977.000,-
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	71.932.943.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	31.663.460.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	6.136.352.000,-
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	109.000.000,-
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.671.393.000,-
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	29.427.711.000,-

BAB II

Akuntabilitas Kinerja



BAB II

TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

II.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.



Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU TAHUNAN	TRIWULAN I					TRIWULAN II					TRIWULAN III					TRIWULAN IV								
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET PROGNOSA KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET PROGNOSA KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET PROGNOSA KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET PROGNOSA KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN				
SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi						73,73%		72,00%			79,90%		65,71%			90,60%		81,55%			100,00%		99,99%				
IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperawatan angkutan jalan	%	100	3.354.025.000	100,00	21,20	21,20%	758.861.250	588.587.099	77,56%	100,00	39,70	39,70%	1.517.722.500	1.067.936.582	70,36%	100,00	71,80	71,80%	2.411.373.750	1.782.342.554	73,91%	100,00	100,00	3.354.025.000	3.353.903.836	100,00%	
IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	12.928.519.000	7,00	7,00	100,00%	3.145.999.500	2.660.389.064	84,56%	7,00	7,00	100,00%	6.496.350.000	4.486.456.559	69,06%	7,00	7,00	100,00%	9.630.215.250	8.544.530.390	88,73%	7,00	7,00	100,00%	12.928.519.000	12.928.199.841	100,00%
IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	4.019.262.000	6,00	6,00	100,00%	1.092.209.250	588.412.253	53,87%	6,00	6,00	100,00%	1.980.067.500	1.142.537.685	57,70%	6,00	6,00	100,00%	3.084.411.000	2.529.763.701	82,02%	6,00	6,00	100,00%	4.019.262.000	4.018.866.749	99,99%
SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat						61,42%		59,44%			99,50%		76,28%			99,50%		78,67%			104,40%		100,00%				
IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	869.696.000	100,00	26,25	26,25%	3.145.999.500	2.660.389.064	84,56%	25,00	26,25	105,00%	6.496.350.000	4.486.456.559	69,06%	25,00	26,25	105,00%	652.272.000	525.895.000	80,63%	25,00	29,87	119,48%	869.696.000	869.695.000	100,00%
IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55	5.081.011.000	65,00	50,71	78,02%	603.387.000	565.790.858	93,77%	55,00	51,42	93,49%	2.115.149.500	1.717.689.186	81,21%	55,00	51,42	93,49%	3.603.162.750	3.218.035.582	89,31%	55,00	51,42	93,49%	5.081.011.000	5.080.999.959	100,00%
IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60	35.000.000	100,00	80,00	80,00%	8.750.000	000	0,00%	80,00	80,00	100,00%	17.500.000	13.750.000	78,57%	80,00	80,00	100,00%	26.250.000	17.500.000	66,67%	60,00	60,13	100,22%	35.000.000	35.000.000	100,00%
SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat						23,41%		27,32%			66,83%		30,40%			69,91%		47,00%			107,31%		94,94%				
IKK3.1 Persentase perkeraspakan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	23.772.850.000	80,00	0,00	0,00%	2.356.475.833	000	0,00%	80,00	50,00	62,50%	13.808.060.000	7.854.724.160	56,89%	80,00	79,10	98,88%	18.086.887.500	17.532.558.034	96,94%	80,00	79,10	98,88%	23.772.850.000	18.974.459.193	79,82%
IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPKID Dijen Perhubungan Darat	%	16	4.242.429.000	13,00	23,00	23,08%	686.130.750	809.944.816	81,95%	16,00	13,00	118,75%	1.372.261.500	1.251.489.895	91,20%	16,00	16,85	94,69%	3.205.716.750	2.851.948.411	88,96%	16,00	18,83	82,31%	4.242.429.000	4.242.289.224	100,00%
IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840	350.000.000	1300,00	0,00	0,00%	87.500.000	000	0,00%	840,00	0,00	0,00%	175000000	0	0,00%	840,00	0,00	0,00%	350.000.000	000	0,00%	1300,00	1300,00	154,76%	350.000.000	349.998.647	100,00%
IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82	810.150.000	100,00	70,58	70,58%	23.750.000	000	0,00%	82,00	70,58	86,07%	127.150.000	000	0,00%	82,00	70,58	86,07%	623.475.000	324.370.218	52,03%	82,00	76,50	93,29%	810.150.000	809.890.276	99,96%
SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat						38,21%		64,84%			55,58%		109,77%			76,31%		59,91%			105,56%		100,00%				
IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90.370.694.000	90,00	34,39	38,21%	1.274.128.000	826.121.846	64,84%	90,00	50,02	55,58%	2.548.256.000	2.797.255.690	109,77%	90,00	68,68	76,31%	67.940.697.750	40.702.465.502	59,91%	90,00	95,00	105,56%	90.370.694.000	90.369.637.010	100,00%
IVA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN																											
SK1 Meningkatkan Brokrasi Dijen Perhubungan Darat Akuntabel						40,00%		150,39%			64,71%		135,08%			89,41%		107,90%			100,00%		99,94%				
IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Periktoran Dijen Perhubungan Darat	Nilai	85	34.859.104.000	85,00	34,00	40,00%	3.472.000.000	5.221.637.927	150,39%	85,00	55,00	64,71%	13.888.000.000	18.760.241.437	135,08%	85,00	76,00	89,41%	26.324.328.000	28.403.899.922	107,90%	85,00	85,00	100,00%	34.859.104.000	34.837.677.668	99,94%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						47,36%					73,30%					85,15%					103,45%						
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						48,11%					77,15%					84,64%					104,00%						
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)						2					5					4					8						
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)						10					7					8					4						

Sumber: Data Diolah BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)



Selama Tahun 2024, ada 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 12 (Dua Belas) IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan direncanakan, dan dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dalam IKK membangun negara sesuai dengan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1.1 : Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan;
2. IKK 1.3 : Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi; dan
3. IKK 1.6 : Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keberintisan Angkutan Jalan Nasional

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan keberintisan angkutan jalan nasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau angkutan umum untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.

Capaian kinerja persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi jumlah rit (Km) dan jumlah penumpang (orang) pada kegiatan subsidi operasional keberintisan angkutan jalan di Sumatera Selatan terhadap target yang telah ditetapkan. Rit adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya.

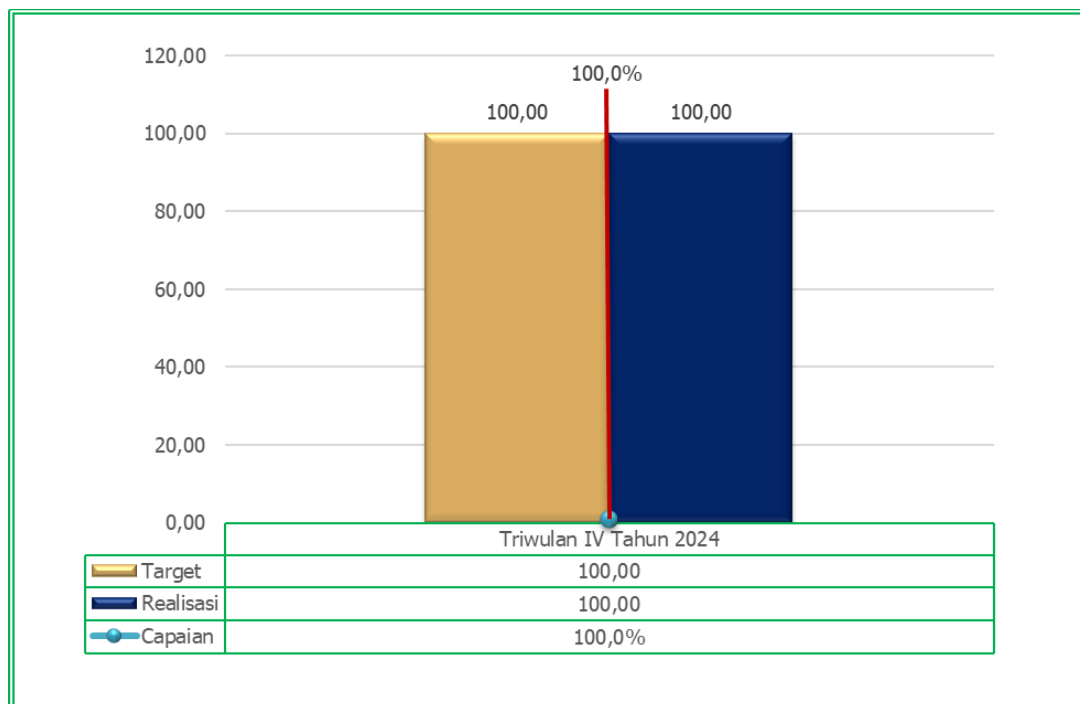
$$\text{Persentase Pelaksanaan Keberintisan Angkutan Jalan Nasional} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional

$$= \frac{\text{Jumlah realisasi rit pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target rit pada tahun (n)}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Triwulan IV sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.1**. Grafik Capaian IKK persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan.



Gambar II.1. Grafik Capaian IKK1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP – DRJD 8317 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024, sebanyak 3 (tiga) trayek ditetapkan untuk dilayani Angkutan Jalan Perintis di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun rute angkutan perintis sebagai berikut:

1. Terminal Simpang Periuk – Simpang 9 Cekar;
2. Terminal Simpang Periuk – Muara Rupit – Simpang Nibung; dan
3. Terminal Simpang Periuk – Karang Dapo – Rawas Ilir.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi pada Tahun 2024 memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan;
2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum; dan
3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilihan transportasi dengan biaya yang terjangkau.

▪ **Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan tercapainya indikator Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional antara lain:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya angkutan keperintisan; dan
3. Kendala dalam mendapatkan BBM Bersubsidi karena kelangkaan di beberapa wilayah yang dilayani angkutan perintis sehingga harus menggunakan BBM Non-Subsidi.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional} \\ &= \frac{\text{Jumlah realisasi rit pada Tahun 2024}}{\text{Jumlah target rit pada Tahun 2024}} \end{aligned}$$

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu tercapainya target perjalanan pulang pergi (ritase) dan kebermanfaatan dalam 1 (satu) tahun pelayanan. Capaian rit untuk masing-masing trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 2 Realisasi Ritase Keperintisan Angkutan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Trayek	Target Ritase (1 Tahun)	Satuan	Total Realisasi Ritase s.d. Triwulan IV	%
1.	Terminal Simpang Periuk – Simpang 9 Cecar	656	Rit	656	100%
2.	Terminal Simpang Periuk – Muara Rupit – Simpang Nibung	663	Rit	663	100%
3.	Terminal Simpang Periuk – Karang Dapo – Rawas Ilir.	618	Rit	618	100%
Total		1.937	Rit	1.937	100%

Sumber: Data Diolah BPTD Kelas II Sumsel (2024)

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1.937}{1.937} \times 100\% = 100\%$$

▪ Realisasi Anggaran

Adapun dukungan anggaran pada Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 3.353.903.836,- dari total anggaran sebesar Rp. 3.354.025.000,- (100%).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan RPJMN, Renstra serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan;
2. Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum;
3. Terus berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang dilalui oleh rute angkutan keperintisan; dan
4. Melaksanakan monitoring efektifitas pelaksanaan angkutan jalan perintis secara mandiri.

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Terminal Tipe-A yang Beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah dioperasikan serta dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Terminal Barang yang beroperasi merupakan terminal barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani angkutan barang di jalan. Jumlah terminal yang dihitung hanya jumlah terminal tipe A,

dikarenakan tidak terdapat terminal barang di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah Terminal Tipe A yang berada di wilayah kerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan sebanyak 7 (tujuh) lokasi, sebagai berikut:

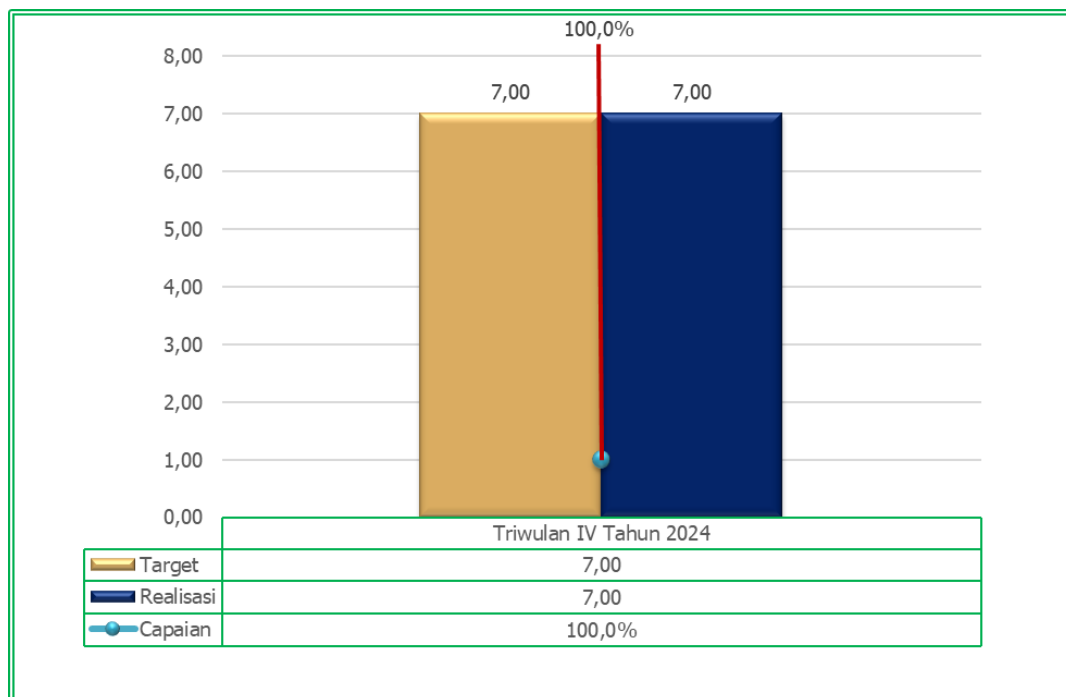
1. Terminal Tipe A Alang-alang Lebar (Kota Palembang);
2. Terminal Tipe A Karya Jaya (Kota Palembang);
3. Terminal Tipe A Betung (Kab. Banyuasin);
4. Terminal Tipe A Kayu Agung (Kab. OKI);
5. Terminal Tipe A Batu Kuning (Kab. OKU);
6. Terminal Tipe A Batay (Kab. Lahat); dan
7. Terminal Tipe A Simpang Periuk (Kota Lubuklinggau).

Jumlah Terminal Tipe – A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan lokasi)}$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi pada Tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh) lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 7 (tujuh) lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.2.** Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi.



Gambar II.2. Grafik Capaian IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PM 20 Tahun 2018 dan terakhir diubah dengan PM 6 Tahun 2023 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, terhadap Operasional Pelayanan Terminal Tipe-A yang beroperasi pada Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Terminal Tipe A yang dilaksanakan oleh seluruh staf di Terminal Tipe-A berjalan dengan baik;
2. Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan manajemen SDM di Terminal Tipe A; dan
3. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 7 (tujuh) lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada rapat Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan 2020-2024.

▪ Faktor Keberhasilan

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2024 antara lain yaitu:

1. Tingginya antusias masyarakat untuk menggunakan angkutan umum;
2. Informasi tentang pelayanan di terminal tersampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi ke berbagai media sosial; dan
3. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat naik dan turun penumpang dan sebagai tempat perpindahan moda.

▪ Faktor Kegagalan

Kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2024 antara lain yaitu:

1. Fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal belum secara keseluruhan tersedia;
2. Fasilitas umum seperti toilet belum maksimal kebersihannya;
3. Kurang tersedianya air bersih di terminal; dan
4. Lokasi terminal kurang strategis dan berada di lokasi turunan/tanjakan jalan.

▪ **Realisasi Kinerja**

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\frac{\text{Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi}}{\text{Realisasi}} = \frac{\text{Target}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan lokasi)}$$

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dihitung berdasarkan perbandingan realisasi jumlah 7 (tujuh) Terminal Tipe A terhadap target yang telah ditetapkan, antara lain:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Adapun realisasi anggaran pada Kegiatan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A untuk 7 (tujuh) Terminal Tipe A per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 12.928.199.841,- dari total anggaran sebesar Rp. 12.928.519.000,- atau sebesar 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu perencanaan yang komprehensif dalam menentukan alokasi kegiatan operasional Terminal Tipe A sesuai dengan kebutuhan anggaran dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra.

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

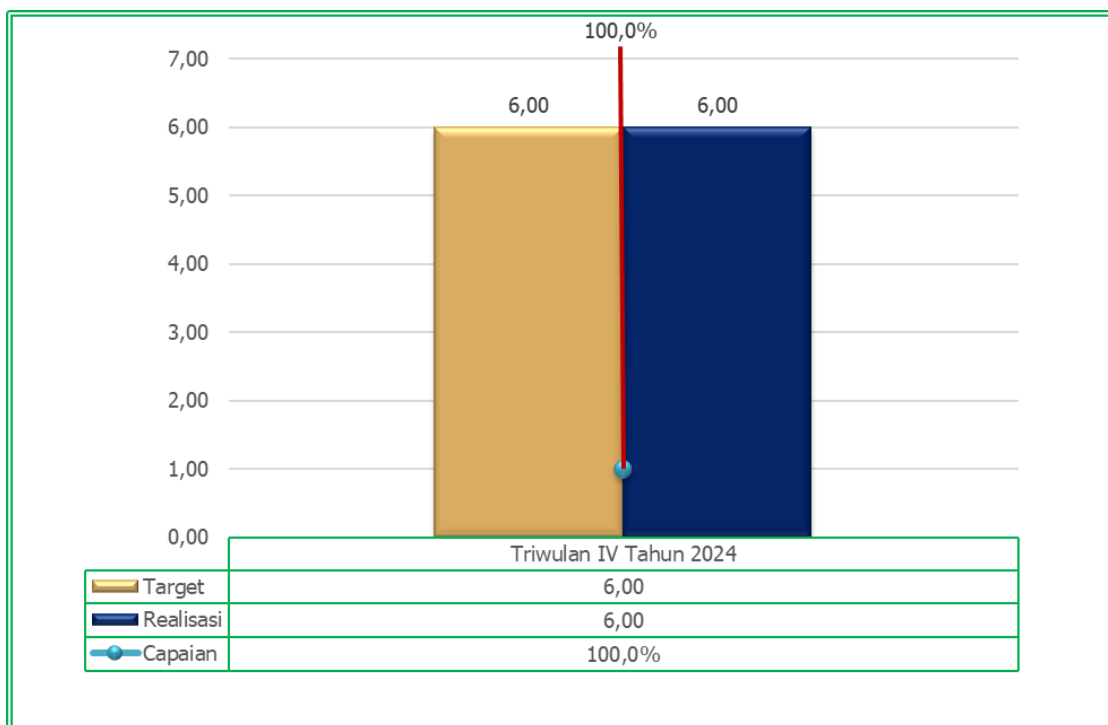
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

$$\text{Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan lokasi)}$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2024 sebanyak 6 (enam) lokasi, jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 6 (enam) lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.3**. Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.



Gambar II.3. Grafik Capaian IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PM 20 Tahun 2018 dan terakhir diubah melalui PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas II Sumatera Selatan memiliki 6 (enam) Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bahwa BPTD Kelas II Sumatera Selatan memiliki 6 (enam) Pelabuhan SDP sebagai berikut:

1. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api (Kabupaten Banyuasin);
2. Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti (Kabupaten Banyuasin);
3. Pelabuhan Sungai Sekayu (Kabupaten Musi Banyuasin);
4. Pelabuhan Sungai 7 Ulu (Kota Palembang);
5. Pelabuhan Sungai Muara Kumbang (Kabupaten Ogan Ilir); dan
6. Pelabuhan Danau Banding Agung (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi antara lain:

1. Petugas di Pelabuhan SDP memiliki kompetensi di bidangnya;
2. Koordinasi yang selalu terjalin dengan instansi/stakeholder terkait;
3. BPTD Kelas II Sumatera Selatan selalu melaksanakan monitoring pelaksanaan operasional di Pelabuhan SDP.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi antara lain:

1. Kurangnya SDM di Pelabuhan SDP;
2. Adanya kondisi alam seperti pasang air laut, cuaca dan ombak yang tinggi; dan
3. Belum tersedianya fasilitas yang lengkap di Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\text{Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan lokasi)}$$

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2024 sebesar 6 (enam) Lokasi sebagaimana PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, sehingga realisasi Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi saat ini sebanyak 6 (enam) Lokasi dan telah memenuhi target sesuai dengan PK Tahun 2024.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{6 \text{ Lokasi}}{6 \text{ Lokasi}} \times 100\% = 100\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Adapun realisasi anggaran dukungan terhadap Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 4.018.866.749,- dari total anggaran sebesar Rp. 4.019.262.000,- atau sebesar 99,99%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang antara lain:

1. percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran setiap bulan untuk keperluan operasional pelabuhan;
2. perencanaan yang komprehensif dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan dan waktu penyerapan anggaran dalam tahun berjalan dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan meningkatnya pelayanan transportasi darat diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 2.1 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A;

IKK 2.2 : Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A; dan

IKK 2.3 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.

IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup jenis (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh dari 6 (enam) indikator jenis pelayanan di 7 (tujuh) Terminal Tipe-A di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan aspek penilaian sebagai berikut.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe – A} \\ & = \text{Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A} \end{aligned}$$

Tabel II.3 Aspek Penilaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A
(Aspek Keselamatan, Keamanan dan Kehandalan/Keteraturan)

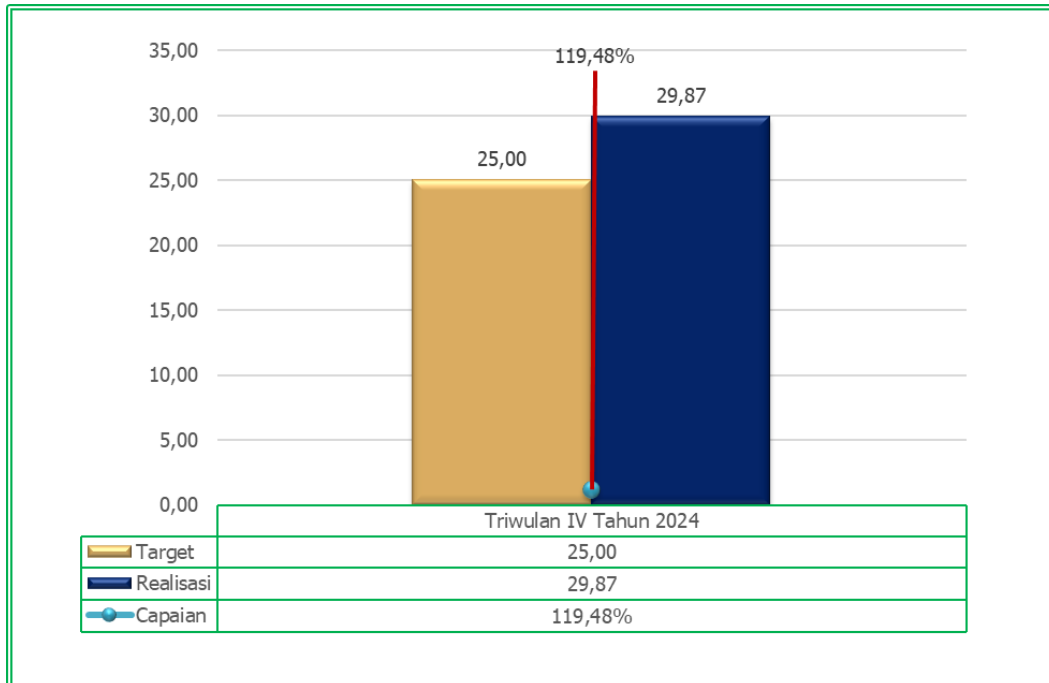
No.	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolok Ukur Indikator
1. Keselamatan				
a	Lajur Pejalan Kaki	Lajur Pejalan Kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor	Ketersediaan	Tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor
b	Fasilitas Keselamatan Jalan	Fasilitas Keselamatan Jalan (rambu, marka, penerangan jalan, pagar)	Ketersediaan	Tersedia fasilitas Keselamatan Jalan rambu marka penerangan jalan pagar
c	Jalur Evakuasi	Jalur evakuasi	Ketersediaan	Tersedia jalur evakuasi
d	Alat Pemadam Kebakaran	Alat pemadam kebakaran	Ketersediaan	Tersedia alat pemadam kebakaran
e	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas Kesehatan Pos Fasilitas, dan Petugas kesehatan
f	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum	Ketersediaan	Tersedia pos fasilitas, dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum
g	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Ketersediaan	Tersedia fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum
h	Informasi fasilitas keselamatan	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan)	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas keselamatan, petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang mudah terlihat dengan jelas
i	Informasi fasilitas kesehatan	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dengan jelas
j	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	Informasi ketersediaan fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor yang mudah terlihat dengan jelas
2. Keamanan				
a	Fasilitas Keamanan	Fasilitas pencegah tindak kriminal	Ketersediaan	Tersedia pos keamanan kamera pengawas, dan titik pengamanan tertentu
b	Media pengaduan gangguan keamanan	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat	Ketersediaan	Tersedia stiker pada tempat yang strategis, mudah terlihat dan jelas terbaca
c	Petugas Keamanan	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi jasa pengguna jasa	Ketersediaan petugas	Minimal 2 (dua) petugas berseragam dan mudah terlihat
3. Kehandalan/Keteraturan				
a	Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan Keteraturan	Tersedianya Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis
b	Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan Keteraturan	Tersedianya jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis
c	Loket penjualan tiket	Loket tempat calon penumpang membeli tiket	Ketersediaan Keteraturan	Loket penjualan tiket tetap dan teratur
d	Kantor Penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal	Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal	Ketersediaan luas	Tersedia kantor penyelenggara terminal control room , dan SIM terminal Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai
e	Petugas Operasional Terminal	Petugas Operasional Terminal yang mengatur operasional terminal	Ketersediaan Keteraturan	Tersedia petugas Operasional Terminal yang mengatur operasional terminal

Tabel II.3 Aspek Penilaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A
(Aspek Kenyamanan, Kemudahan/Keterjangkauan dan Kesetaraan) – Lanjutan

No.	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolok Ukur Indikator
4. Kenyamanan				
a	Ruang Tunggu	Ruangan/tempat yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)	Ketersediaan	Tersedia tempat duduk
			Kondisi	Area Bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal
			Keteraturan	dilakukan kanalisasi penumpang, dan diklasifikasikan berdasarkan zona
b	Toilet	Tersedianya Toilet	Jumlah	Pria (4 Urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel) Wanita (6 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel)
			Kondisi	Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal
c	Fasilitas peribadatan/mushola	Fasilitas untuk melakukan ibadah	Luas	Pria (11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Wanita (9 normal dan 2 penyandang disabilitas)
			Kondisi	Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal
d	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau disediakan untuk area penghijauan	Ketersediaan	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan
			Luas	Terdapat alat-alat kebersihan, penyiraman taman
			Kondisi	Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah
e	Rumah makan	Rumah makan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan
f	Fasilitas dan petugas kebersihan	Fasilitas dan petugas kebersihan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas dan petugas kebersihan
g	Tempat istirahat awak kendaraan	Tempat istirahat awak kendaraan	Ketersediaan	Tempat istirahat awak kendaraan
h	Area merokok (<i>smoking area</i>)	Tempat khusus untuk merokok	Ketersediaan	Tersedia <i>smoking area</i>
i	Drainase	Drainase yang memadai	Ketersediaan	Tersedia drainase yang memadai
j	Area dengan jaringan internet (<i>hotspot area</i>)	Area yang tersedia jaringan internet (<i>hotspot area</i>)	Ketersediaan	Tersedia <i>hotspot area</i>
k	Ruang Baca (<i>reading corner</i>)	Ruang Baca (<i>reading corner</i>)	Ketersediaan	Tersedia ruang baca (<i>reading corner</i>)
l	Lampu penerangan ruangan	Lampu penerangan ruangan	Ketersediaan	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi
5. Kemudahan/Keterjangkauan				
a	Letak jalur pemberangkatan	Kapasitas letak jalur pemberangkatan kendaraan	Keteraturan	Letak jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur
				Terpisah dengan jalur penurunan penumpang
				Tidak boleh terdapat <i>crossing</i> dengan kendaraan lain
b	Letak jalur kedatangan	Kepastian letak kedatangan kendaraan	Keteraturan	Letak jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur
				Terpisah dengan jalur penurunan penumpang
				Tidak boleh terdapat <i>crossing</i> dengan kendaraan lain
c	Informasi pelayanan	Visual : Denah/layout terminal. Nomor trayek, nama PO dan kelas pelayanannya. Nama terminal keberangkatan. Jadwal. Tarif. Peta jaringan	Tempat/ruang	Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca
		Audio : Informasi pelayanan (disebutkan apa saja). Kejadian khusus dan gangguan	Tempat Intensitas Cahaya	Diletakkan di tempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada
d	Informasi angkutan lanjutan	Informasi yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat : Jenis angkutan, lokasi angkutan lanjutan, jam pelayanan angkutan lanjutan, jurusan/rute, tarif	Tempat Kondisi	Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca
e	Informasi gangguan perjalanan mobil bus	Fasilitas dalam terminal yang memberikan informasi penyebab keterlambatan jadwal perjalanan mobil bus seperti gangguan keamanan, operasional, dan keselamatan.	Intensitas suara	Informasi diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada
f	Tempat penitipan barang	Tempat penitipan barang	Ketersediaan	Tersedia tempat penitipan barang sesuai kebutuhan
g	Fasilitas pengisian baterai (<i>charging corner</i>)	Fasilitas pengisian baterai (<i>charging corner</i>)	Ketersediaan	Fasilitas pengisian baterai (<i>charging corner</i>)
h	Tempat naik/turun penumpang	Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus	Aksesibilitas	Tinggi <i>platform</i> sama dengan tinggi lantai bus
i	Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi	Tempat parkir untuk kendaraan baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	Ketersediaan	Tersedia tempat parkir dengan luas disesuaikan dengan lahan yang tersedia
6. Kesetaraan				
a	Fasilitas penyandang cacat (difabel)	Fasilitas yang disediakan untuk pengguna jasa difabel	Aksesibilitas	Terdapat ramp portable atau ramp permanen dengan kemiringan maksimum 20° untuk penyambung dari <i>platform</i> ke kendaraan.
				Toilet pengguna difabel
				Kursi roda difabel.
b	Ruang ibu menyusui	Ruangan/tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi	Ketersediaan	Tersedia ruang tertutup khusus beserta fasilitas lengkap untuk ibu menyusui dan bayi

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 sebesar 29,87% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 25%, maka capaian kinerja mencapai 119,48%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.4**.



Gambar II. 4. Grafik Capaian IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A yaitu berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup jenis (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A terhadap pelayanan transportasi darat memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian kinerja terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan peningkatan pelayanan transportasi darat;
2. Terlaksananya kegiatan monitoring pemenuhan SPM secara berkala di Terminal Tipe A;
3. Terwujudnya aspek pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan pelayanan kesetaraan di Terminal Tipe A dengan melakukan monitoring secara berkala.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A antara lain:

1. Kendala alam seperti asap dari kebakaran hutan menyebabkan jarak pandang yang sulit terlihat jelas di akses keluar masuk kendaraan di Terminal Tipe A;
2. Kurang berkenannya penumpang untuk mengisi kuesioner terkait survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A;
3. Kurang kesadaran penumpang untuk menjaga kebersihan di Lingkungan di Terminal Tipe A, padahal tempat sampah sudah disediakan di setiap sudut di Terminal Tipe A.

▪ **Realisasi Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 tercapai 26,25% terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dimana perolehan 26,25% berasal dari perhitungan jumlah persentase pembobotan pemenuhan SPM di 7 (tujuh) Terminal Tipe A terhadap pemenuhan 6 (enam) indikator jenis pelayanan dengan hasil penilaian sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A}$$

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan

Terminal Angkutan Jalan sebesar 26,25%. Standar Pelayanan Terminal Penumpang mencakup (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung berdasarkan Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A terhadap 6 (enam) indikator jenis pelayanan di Terminal Tipe-A di Provinsi Sumatera Selatan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan penilaian SPM di Terminal Tipe A dengan hasil rekapitulasi nilai (dalam satuan %) sebagai berikut.

IKK 2.1 = Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A.

IKK 2.1 (Terminal Tipe A Alang-Alang Lebar)

$$= \frac{44,42}{100} \times 100\% = 44,42\%$$

IKK 2.1 (Terminal Tipe A Karya Jaya)

$$= \frac{33,45}{100} \times 100\% = 33,45\%$$

IKK 2.1 (Terminal Tipe A Kayu Agung)

$$= \frac{24,03}{100} \times 100\% = 24,03\%$$

IKK 2.1 (Terminal Tipe A Batu Kuning)

$$= \frac{22,38}{100} \times 100\% = 22,38\%$$

IKK 2.1 (Terminal Tipe A Batay)

$$= \frac{31,80}{100} \times 100\% = 31,80\%$$

IKK 2.1 (Terminal Tipe A Simpang Periuik)

$$= \frac{30,97}{100} \times 100\% = 30,97\%$$

IKK 2.1 (Terminal Tipe A Betung)

$$= \frac{22,05}{100} \times 100\% = 22,05\%$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A pada Tahun 2024 memiliki persentase capaian sebesar 119,48%.

▪ Realisasi Anggaran

Adapun dukungan anggaran terhadap Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 869.695.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 869.696.000,- atau sebesar 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan pelayanan dan fasilitas di Terminal Tipe-A;
2. Melakukan upaya peningkatan secara berkelanjutan terhadap 6 (enam) aspek di Terminal Tipe A yaitu (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan;
3. Melaksanakan pelayanan di Terminal Tipe A sesuai dengan SPM; dan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A.

IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

a.1. Definisi Indikator Kinerja

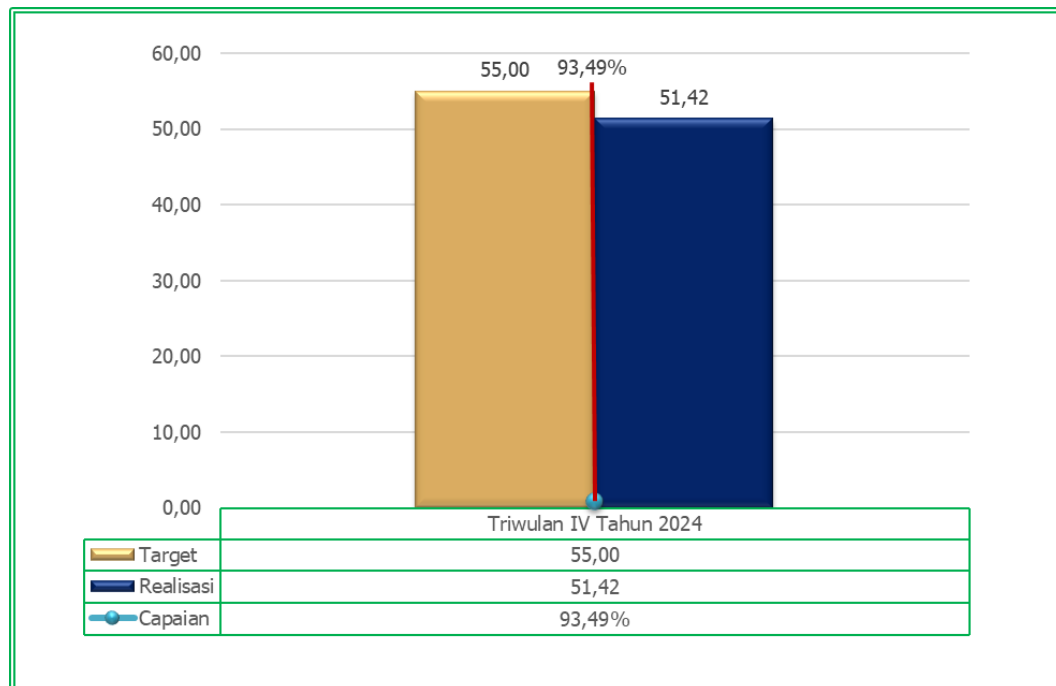
Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A merupakan perbandingan antara persentase jumlah Terminal Tipe A yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang melaporkan data operasional terminal secara *online* (bobot 50%) ditambah dengan persentase jumlah Terminal Tipe A yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang berada di Terminal Tipe A dapat berupa *vending machine*, *passenger barrier gate*, *vehicle barrier gate*, *CCTV*, *counting passenger*, *information display*.

$$\text{Persentase Terminal Tipe A Online} = \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe - A} \\ = & (\text{Persentase Terminal Tipe A yang melaporkan data operasional online} \times 50\%) \\ & + \left(\text{Persentase jumlah TTA yang telah dipasang} \right. \\ & \quad \left. \text{perangkat digitalisasi Terminal} \times 50\% \right) \end{aligned}$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2024 sebesar 51,42% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 55%, maka capaian kinerja mencapai 93,49%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.5**.



Gambar II. 5. Grafik Capaian IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan pada Pasal 68 terkait Sistem Informasi Manajemen Terminal bahwa pemantauan kegiatan terminal yang diintegrasikan pada pusat data yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Selain itu, Penerapan SMART Terminal Tipe A dilengkapi dengan perangkat digitalisasi berupa *vending machine*, *passenger barrier gate*, *vehicle barrier gate*, *CCTV*, *counting passenger*, *information display*.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A terhadap pelayanan transportasi darat memiliki target 55% yang diperoleh dari capaian kinerja terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A antara lain:

1. Terlaksananya kegiatan pemantauan data operasional di Terminal Tipe A; dan
2. Tersedianya perangkat digitalisasi di Terminal Tipe A untuk mendukung pelaporan data operasional terminal secara *online*.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A antara lain:

1. Kurangnya pemahaman SDM dalam melaksanakan pelaporan data operasional; dan
2. Belum teralokasinya anggaran penyediaan perangkat digitalisasi di seluruh Terminal Tipe A.

▪ **Realisasi Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2024 tercapai 51,42% terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = (\text{Persentase TTA online} \times 50\%) + \left(\frac{\text{Persentase TTA yang telah dipasang}}{\text{perangkat digitalisasi Terminal}} \times 50\% \right)$$

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A dihitung berdasarkan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara *online* (bobot 50%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 6 (enam) item, yaitu: *vending machine*, *passenger barrier gate*, *vehicle barrier gate*, *CCTV*, *counting passenger*, *information display*.

Berdasarkan kondisi eksisting di lapangan bahwa 7 (tujuh) terminal yang berada di Provinsi Sumatera Selatan meliputi Terminal Tipe A Alang-alang Lebar (Kota Palembang), Terminal Tipe A Karya Jaya (Kota Palembang), Terminal Tipe A Betung (Kab. Banyuasin), Terminal Tipe A Kayu Agung (Kab. OKI), Terminal Tipe A Batu Kuning (Kab. OKU), Terminal Tipe A Batai (Kab. Lahat), Terminal Tipe A Simpang Periuk (Kota Lubuklinggau) telah melaporkan pelaksanaan operasionalnya berupa data produksi secara *online* yang dilaporkan melalui *website* SIASATI (Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia) <https://siasati.dephub.go.id/login>. Selain itu pelaporan data produksi Terminal Tipe A juga direkapitulasi oleh admin internal BPTD Kelas II Sumatera Selatan melalui link *dashboard* aplikasi lookerstudio.google.com (https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/713ec446-cf34-4a5a-bef6-603b16ecb7d9/page/p_nd56u4rywc), sehingga diperoleh bobot persentase sebesar 50%. Untuk persentase Terminal Tipe A (TTA) yang telah dipasang perangkat digitalisasi ditentukan bobot 50%, dimana masing-masing pemenuhan 6 (enam) item

perangkat digitalisasi terminal ditentukan persentase aspek penilaian bobotnya sebagai berikut:

Tabel II. 4 Aspek Penilaian Penerapan *SMART* Terminal Tipe A

NO	ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)
1	<i>Vending Machine</i>	20%
2	<i>Passenger Barrier Gate</i>	20%
3	<i>Vehicle Barrier Gate</i>	20%
4	<i>CCTV</i>	10%
5	<i>Counting Passenger</i>	10%
6	<i>Information Display</i>	20%

Sumber: Analisa BPTD Sumsel (2023)

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari 7 (tujuh) terminal yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 1 (satu) terminal yang telah memenuhi aspek penilaian *SMART* terminal yaitu Terminal Tipe A Alang-alang Lebar dan Terminal Tipe A Karya Jaya, dimana aspek penilaian pemenuhan perangkat digitalisasi berupa CCTV (prosentase 10%) yang terpasang di Terminal Tipe A Alang-alang Lebar dan Terminal Tipe A Karya Jaya sehingga diperoleh total bobot sebesar 10%. Untuk itu total keseluruhan capaian IKK Persentase Penerapan *SMART* Terminal Tipe-A Tahun 2024 diperoleh hasil sebesar 51,42% dengan perumusan secara terperinci sebagai berikut:

$$IKK\ 2.2 = (\text{Persentase TTA online} \times 50\%) + \left(\frac{\text{Persentase TTA yang telah dipasang}}{\text{perangkat digitalisasi Terminal}} \times 50\% \right)$$

$$IKK\ 2.2 = \left(\frac{7}{7} \times 50\% \right) + \left(\frac{10\% (\text{bobot aspek penilaian})}{100\% (\text{total bobot aspek penilaian})} \times \frac{2}{7} \times 50\% \right)$$

$$IKK\ 2.2 = (50\%) + (1,42) = 51,42\%$$

▪ Realisasi Anggaran

Adapun dukungan anggaran pelaksanaan Persentase Penerapan *SMART* Terminal Tipe-A ini senilai Rp. 5.081.011.000,- dengan realisasi hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.080.999.959,- atau mencapai 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan peningkatan dan perbaikan Sistem Informasi Manajemen di Terminal Tipe A secara digital;
2. Penyediaan perangkat digitalisasi yang lengkap di Terminal Tipe A untuk mendukung pelaksanaan pelaporan data operasional secara *online* dan *real time*; dan
3. Peningkatan kualitas SDM khususnya di bidang IT untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen di Terminal Tipe A.

IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Penumpang di Pelabuhan Penyeberangan paling sedikit meliputi (1) keselamatan, (2) keamanan, (3) kehandalan/keteraturan, (4) kenyamanan, (5) kemudahan/keterjangkauan, (6) kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan total nilai (*score*) yang diperoleh dari masing-masing pemenuhan 6 (enam) aspek pelayanan di Pelabuhan SDP di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP} \\ & = \text{Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP} \end{aligned}$$

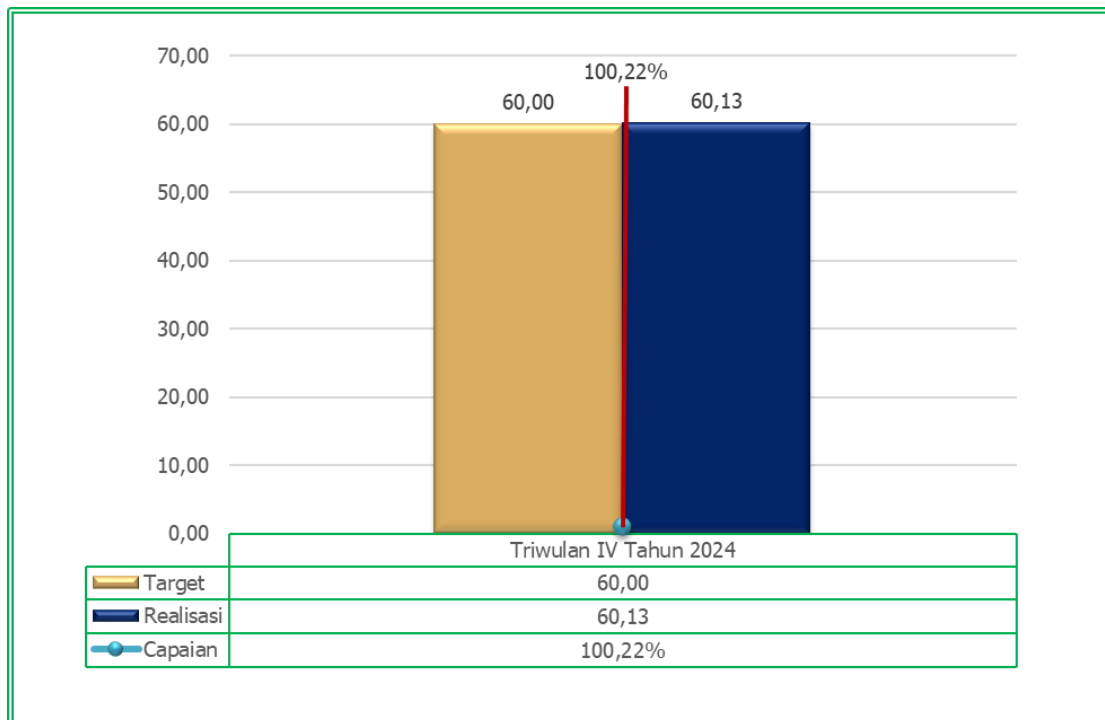
Tabel II.5 Aspek Penilaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP

NO	URAIAN PELAYANAN	BOBOT
A.	Pelayanan Penumpang Di Pelabuhan Penyeberangan	
A.1.	PELAYANAN DI TERMINAL PENUMPANG	
1	KESELAMATAN	3,00%
2	KEAMANAN	3,00%
3	KENYAMANAN	3,00%
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	3,00%
5	KEHANDALAN KETERATURAN	3,00%
6	KESETARAAN	3,00%
A.2.	PELAYANAN RUANG TUNGGU	
1	KESELAMATAN	3,50%
2	KEAMANAN	3,50%
3	KENYAMANAN	3,50%
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	3,50%
5	KEHANDALAN KETERATURAN	3,50%
6	KESETARAAN	3,50%
A.3.	Pelayanan di Gangway	
1	KEAMANAN	3,50%
2	KENYAMANAN	3,50%
3	KESETARAAN	3,50%
B.	PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN PENYEBERANGAN	
1	KESELAMATAN	6,50%
2	KENYAMANAN	6,50%
3	KEHANDALAN KETERATURAN	6,50%
C.	Pelayanan Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan	
C.1.	KENDARAAN DI JEMBATAN TIMBANG	
1	KESELAMATAN	2,40%
2	KEAMANAN	2,40%
3	KENYAMANAN	2,40%
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	2,40%
5	KEHANDALAN KETERATURAN	2,40%
C.2.	KENDARAAN DI LOKET	
1	KENYAMANAN	2,50%
2	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	2,50%
3	KEHANDALAN KETERATURAN	2,50%
C.3.	KENDARAAN DI PARKIR TUNGGU	
1	KENYAMANAN	2,50%
2	KEHANDALAN KETERATURAN	2,50%
C.4.	KENDARAAN DI PARKIR SIAP MUAT	
1	KENYAMANAN	3,25%
2	KEHANDALAN KETERATURAN	3,25%
Total		100,00%

Sumber : Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 sebesar 60,13% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 60%, maka capaian kinerja mencapai 100,22%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.6**.



Gambar II. 6. Grafik Capaian IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan, dimana mencakup 6 (enam) 1) keselamatan, (2) keamanan, (3) kehandalan/keteraturan, (4) kenyamanan, (5) kemudahan/keterjangkauan, (6) kesetaraan.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terhadap pelayanan transportasi darat memiliki target 80% yang diperoleh dari capaian kinerja terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ Faktor Keberhasilan

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP antara lain dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan dengan adanya tindak lanjut sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal keberangkatan di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap ketepatan jadwal di lapangan;
3. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal; dan
4. Memberikan sanksi tegas dan memberikan efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dalam mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP, antara lain:

1. Pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan; dan
2. Pelaksanaan pemenuhan SPM kapal penyeberangan dan SPM pelabuhan penyeberangan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP antara lain:

1. Kendala cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi dan musim penghujan, sehingga dapat menghambat kegiatan tersebut;
2. Kurangnya pemahaman pengguna jasa tentang keselamatan dan ketertiban selama melakukan perjalanan dalam menggunakan angkutan penyeberangan; dan
3. Masih adanya kendaraan ODOL (*Over Dimension and Over Loading*) yang menggunakan fasilitas angkutan penyeberangan, sehingga dapat membahayakan kendaraan dan pengguna jasa lain.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 80% dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP} \\ &= \text{Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP} \end{aligned}$$

▪ **Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diperoleh dari jumlah persentase pembobotan pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP yang dilaksanakan di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api. Berdasarkan hasil survey pelaksanaan SPM di Pelabuhan Tanjung Api-api dan Pelabuhan Sri Menanti diperoleh *total score* dari pemenuhan aspek Standar Pelayanan Minimum sebesar 60,13% dengan hasil sebagai berikut.

IKK 2.3 (Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api)

$$= 76,25/100 \times 100\% = 76,25\%$$

IKK 2.3 (Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti)

$$= 44,00/100 \times 100\% = 44,00\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 35.000.000,- atau mencapai 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di sungai, danau dan penyeberangan;
2. Peningkatan keselamatan, keamanan dan ketertiban di Pelabuhan SDP;
3. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kapal;
4. Melaksanakan pelayanan di Pelabuhan SDP sesuai dengan SPM; dan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 3.1 : Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;

IKK 3.2 : Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat;

IKK 3.5 : Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan;

IKK 7a : Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.

IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

1. Rambu Lalu Lintas;
2. Marka Jalan;
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
4. Alat Penerangan Jalan;
5. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
6. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;
7. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
8. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Indikator Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

= Jumlah persentase pembobotan item perlengkapan jalan yang terpasang di Prov. Sumsel pada tahun n

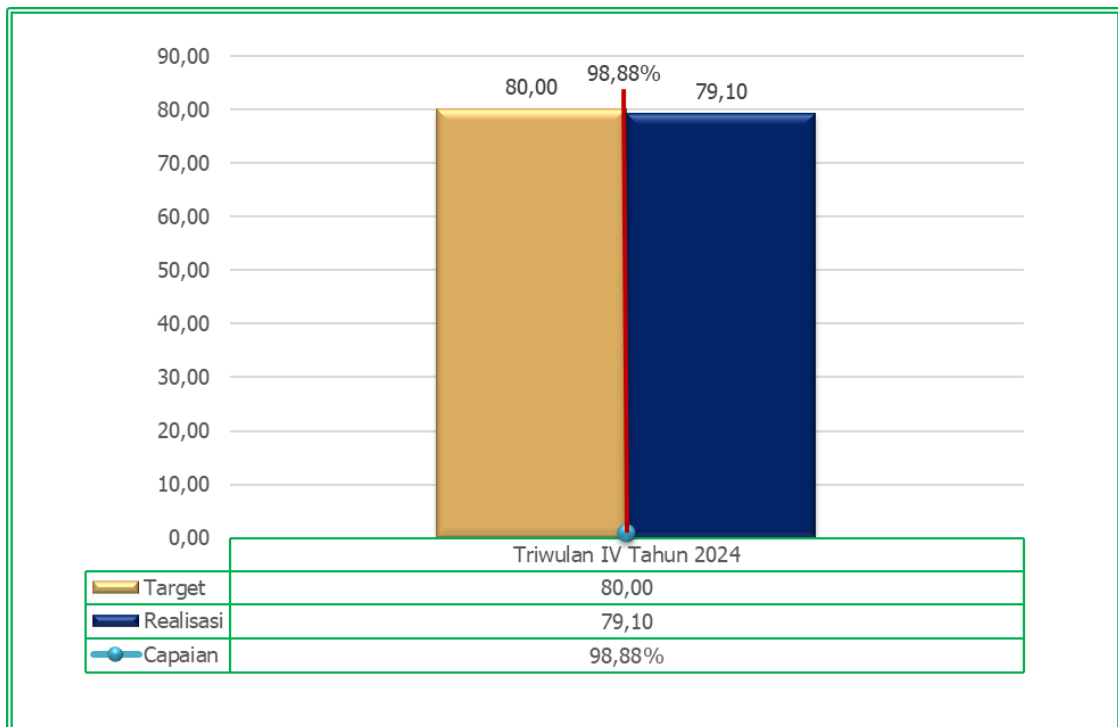
Tabel II.6 Asumsi Pembobotan Pemenuhan Item Perlengkapan Jalan

NO	ITEM PERLENGKAPAN JALAN	BOBOT (%)
1	Marka Jalan	10%
2	Rambu Lalu Lintas	10%
3	Patok Lalu Lintas	10%
4	Paku Jalan	10%
5	Pagar Pengaman Jalan	10%
6	Alat Penerangan Jalan	10%
7	Lampu Peringatan Pemakai Jalan	10%
8	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	10%
9	Cermin Tikungan	10%
10	Pembatas Lalu Lintas	10%

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2024 sebesar 79,10% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 98,88%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.7**.



Gambar II.7. Grafik Capaian IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal terhadap keselamatan transportasi darat memiliki target 80% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal antara lain:

1. Terpenuhinya item fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis perlengkapan jalan;
2. Pekerjaan pemasangan perlengkapan jalan terlaksana tepat waktu; dan
3. Alokasi anggaran perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan perlengkapan jalan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan seperti cuaca kurang baik;
2. Pekerjaan tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
3. Alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan perlengkapan jalan.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 79,10%.

*Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
= Jumlah persentase pembobotan item perlengkapan Jalan yang terpasang di Prov.Sumsel pada tahun n*

▪ **Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 79,10%, dimana pada Triwulan IV Tahun 2024 jumlah realisasi perlengkapan jalan yang telah terpasang di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 184.601 dengan target sebesar 233.277 meliputi Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, Patok Lalu Lintas, Paku Jalan, Lampu Peringatan Pemakai Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 79,10% sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II. 7 Realisasi Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang
Pada Triwulan IV Tahun 2024

NO	ITEM PERLENGKAPAN JALAN	BOBOT (%)	JUMLAH TARGET KEBUTUHAN PERLENGKAPAN JALAN TAHUN 2024	JUMLAH REALISASI PERLENGKAPAN JALAN YANG TELAH TERPASANG TAHUN 2024	% CAPAIAN TRIWULAN I	% CAPAIAN TRIWULAN II	% CAPAIAN TRIWULAN III	% CAPAIAN TRIWULAN IV	KET.
1	Marka Jalan	10%	225.152	178.076	0%	8%	7,9%	7,9%	Terpasang
2	Rambu Lalu Lintas	10%	220	220	0%	10%	10,0%	10,0%	Terpasang
3	Patok Lalu Lintas	10%	800	100	0%	2%	1,3%	1,3%	Terpasang
4	Paku Jalan	10%	6.200	6.200	0%	10%	10,0%	10,0%	Terpasang
5	Pagar Pengaman Jalan	10%	900	0	0%	0%	0,0%	0,0%	Terpasang
6	Alat Penerangan Jalan	10%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	Tidak Ada/Tidak Terpasang
7	Lampu Peringatan Pemakai Jalan	10%	4	4	0%	10%	10,0%	10,0%	Terpasang
8	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	10%	1	1	0%	10%	10,0%	10,0%	Terpasang
9	Cermin Tikungan	10%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	Tidak Ada/Tidak Terpasang
10	Pembatas Lalu Lintas	10%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	Tidak Ada/Tidak Terpasang
Jumlah		100%	233.277	184.601	0%	50%	79,1%	79,1%	

Sumber: Data Diolah BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

▪ Realisasi Anggaran

Adapun dukungan anggaran pada pelaksanaan Pelaksanaan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal yaitu pada Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan, Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan serta Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan sebesar Rp. 18.974.790.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 18.974.459.193,- atau mencapai 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang antara lain:

- Melaksanakan monitoring / pengawasan kegiatan pemasangan perlengkapan jalan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian lokasi pemasangan dengan kebutuhan perlengkapan jalan di lapangan;
- Melakukan perencanaan yang komprehensif terkait waktu pemasangan perlengkapan jalan dan alokasi kebutuhan anggaran agar sesuai dengan target penyelesaian pekerjaan; dan
- Merencanakan optimalisasi waktu dan anggaran agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan persentase perbandingan jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran kelebihan muatan di UPPKB dengan jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk di UPPKB (UPPKB Merapi, UPPKB Talang Kelapa dan UPPKB Kertapati). Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi

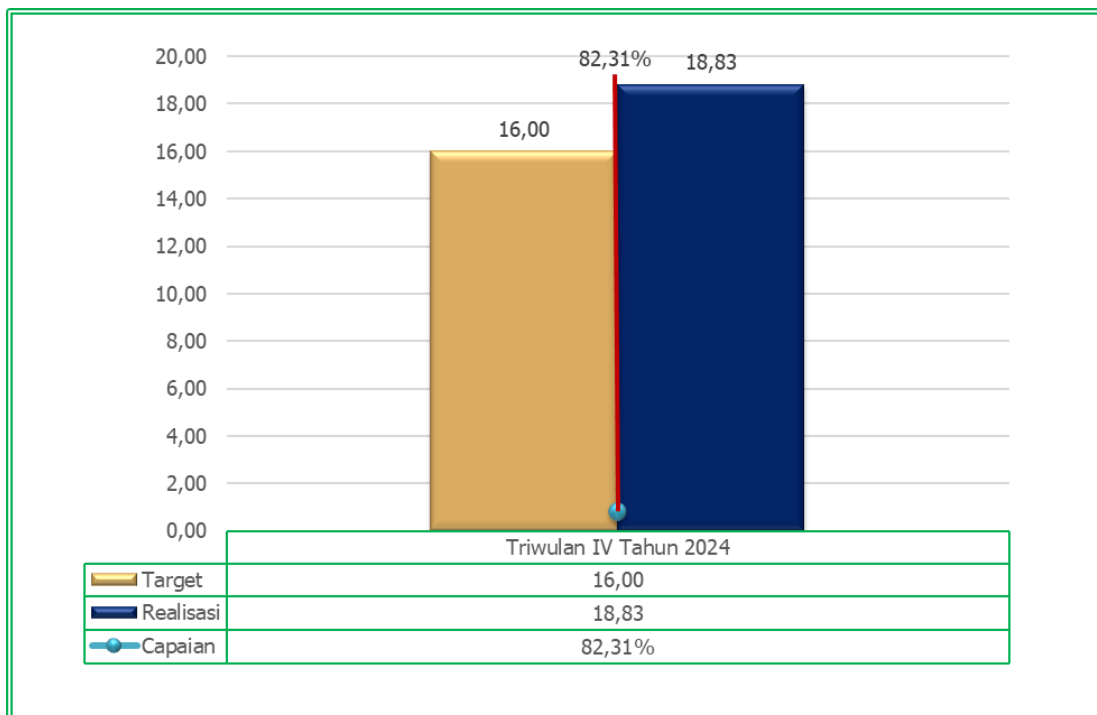
pelanggaran daya angkut, dimensi kendaraan, persyaratan teknis, dokumen kendaraan, tata cara muat, kelas jalan yang tercatat di dalam UPPKB. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Nomor AJ.007/2/17/DRJD/2020 tanggal 6 April 2020 perihal Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok dan Barang Penting, pelanggaran kendaraan angkutan barang adalah pelanggaran terhadap kelebihan muatan yang tercatat di dalam UPPKB. Jumlah pelanggaran di UPPKB dilaporkan per bulan dan persentase pelanggaran per tahun dihitung rata-rata dari persentase pelanggaran per bulan.

Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

$$= \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang dilakukan penindakan tilang di UPPKB}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk di UPPKB}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 sebesar 18,83% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 16%, maka capaian kinerja mencapai 82,31%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.8**. Grafik Capaian IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar II.8. Grafik Capaian IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan; dan
3. dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 116 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Penindakan Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Atas Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*) dan/atau Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) di Jalan Tol.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terhadap keselamatan transportasi darat memiliki target 16% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya yaitu dengan beroperasinya UPPKB Merapi serta dengan berdasarkan kondisi lapangan, dimana terdapat penambahan 2 (dua) UPPKB yang beroperasi selain dari UPPKB Merapi yaitu UPPKB Talang Kelapa dan UPPKB Kertapati yang berdampak pada peningkatan pelanggaran kelebihan muatan.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Terlaksanakan kegiatan pengawasan terkait pelanggaran dimensi dan muatan (*over dimension and over loading*) di UPPKB;
2. Terlaksanakan kegiatan penegakan hukum pada angkutan barang yang melakukan pelanggaran dimensi dan muatan (*over dimension and over loading*) di UPPKB; dan
3. Terlaksanakan kegiatan sosialisasi dimensi dan muatan angkutan ODOL (*over dimension and over loading*) kepada operator angkutan barang untuk mengurangi ODOL di jalan.

▪ Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Kurangnya pemahaman operator angkutan barang dan pengemudi terkait ketentuan dimensi dan muatan (*over dimension and over loading*); dan
2. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam melaksanakan penegakan hukum terkait ODOL (*over dimension and over loading*).

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 berdasarkan data pelanggaran di UPPKB Merapi, UPPKB Talang Kelapa dan UPPKB Kertapati sebagaimana uraian berikut.

IKK 3.2 (UPPKB Merapi)

$$= 5/4853 \times 100\% = 0,10\%$$

IKK 3.2 (UPPKB Kertapati)

$$= 7443/32811 \times 100\% = 22,68\%$$

IKK 3.2 (UPPKB Talang Kelapa)

$$= 2859/17070 \times 100\% = 16,75\%$$

IKK 3.2 (UPPKB Merapi, Kertapati dan Talang Kelapa)

$$= 10307/54734 \times 100\% = 18,83\%$$

Pelanggaran kelebihan muatan di UPPKB berdasarkan tabel di atas diperoleh rata-rata pelanggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar 18,83%, dimana dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 16%.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat} \\ &= \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\% \end{aligned}$$

▪ **Capaian Kinerja**

Persentase capaian kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dihitung apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk. Berdasarkan realisasi data kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat diperoleh hasil capaian sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{(16 - (18,83 - 16))}{16} \times 100\% = 82,31\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Adapun dukungan anggaran Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat ialah melalui kegiatan Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.242.429.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.242.289.224,- atau 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan bidang sarana dan prasarana perhubungan darat;
2. Melaksanakan inspeksi keselamatan LLAJ atau *rampcheck* angkutan;
3. Melaksanakan penegakan hukum angkutan dengan bekerja sama dengan *stakeholder* terkait; dan
4. Melaksanakan sosialisasi ODOL (*over dimension and over loading*) kepada perusahaan dan *driver* angkutan.

IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

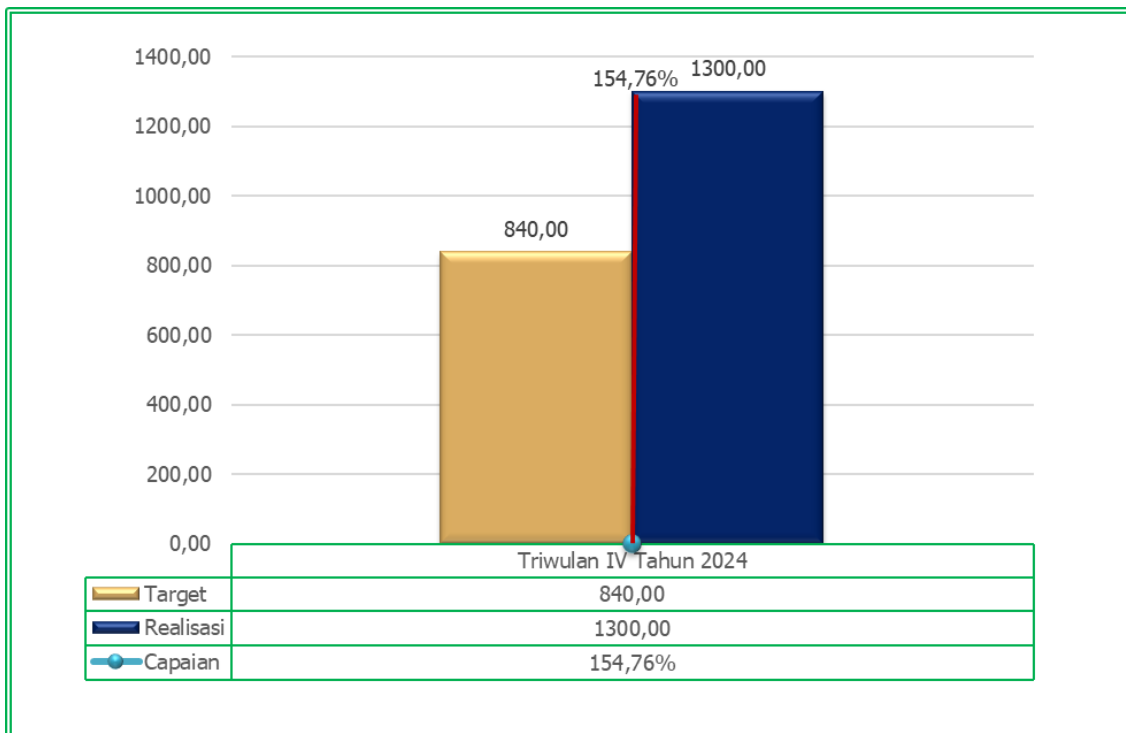
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan pada kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan
 = *Realisasi jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan*
 (dalam satuan orang)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 1300 (seribu tiga ratus) orang jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 840 (delapan ratus empat puluh) orang, maka capaian kinerja mencapai 154,76%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.9**



Gambar II.9. Grafik Capaian IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan yaitu pada Pasal 208 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terkait Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b terkait Sosialisasi dan Internalisasi Tata Cara dan Etika Berlalu Lintas serta Program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan terhadap keselamatan transportasi darat memiliki target 840 orang yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan pada adanya peningkatan jumlah masyarakat yang menjadi target kegiatan sosialisasi keselamatan di jalan.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan antara lain:

1. Menurunnya angka terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan;
2. Terwujudnya Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap tahun;
3. Petugas di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, Pelabuhan SDP dan UPPKB, operator angkutan serta pengguna jasa angkutan memahami terkait informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan antara lain:

1. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan secara dalam kurun waktu yang singkat dikarenakan tidak tersampainya informasi terkait keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Meningkatnya jumlah pelanggaran kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas di jalan seperti tidak menggunakan helm dan *safety belt*; dan
3. Petugas di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, Pelabuhan SDP dan UPPKB, kurang kompeten dalam menyampaikan informasi keselamatan lalu lintas di jalan kepada pengguna jasa angkutan umum.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan
= Realisasi jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan

▪ **Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 1300 (seribu tiga ratus) orang dengan target kinerja sebesar 840 (delapan ratus empat puluh) orang, sehingga capaian kinerja mencapai 154,76%.

Capaian Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan
= 1300 orang

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar Rp. 350.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 349.998.647,- atau 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara berkala yaitu ke operator angkutan, pengguna jasa angkutan umum serta anak usia dini; dan
2. Mengalokasikan kebutuhan anggaran sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara berkala minimal setiap tahun.

IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.1. Definisi Indikator Kinerja

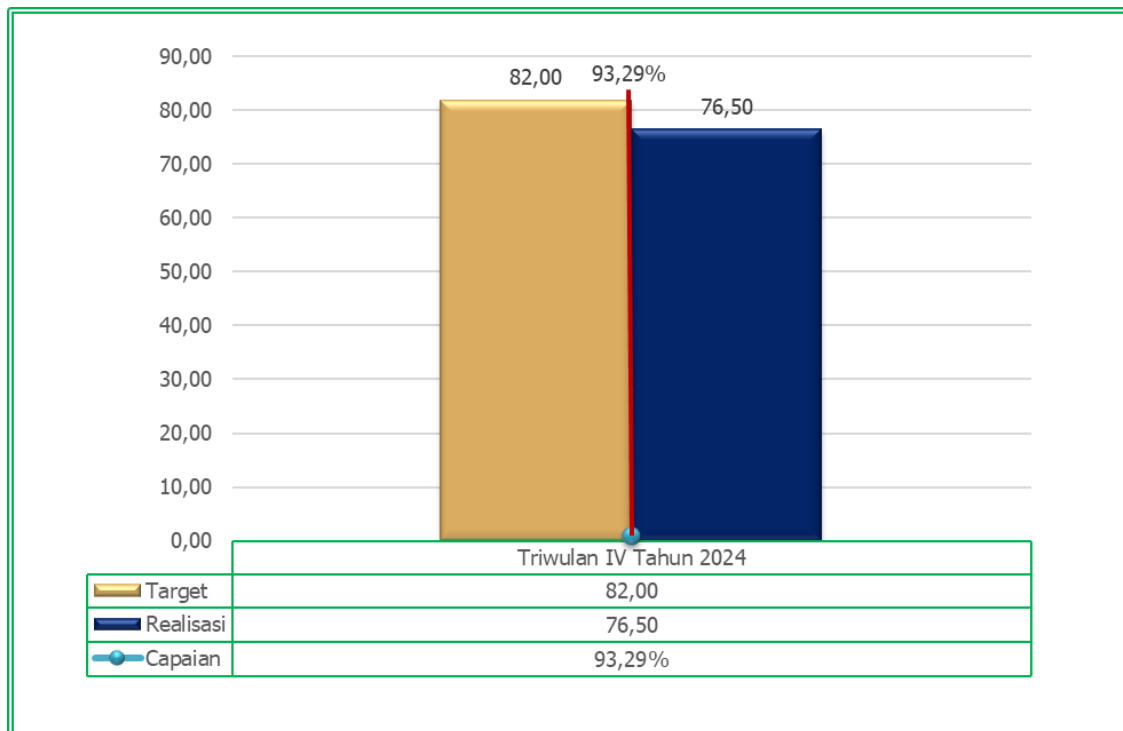
Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dinilai berdasarkan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang merupakan pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala dilaksanakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, sedangkan untuk pelaksanaan Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang menjadi tugas dan fungsi BPTD pada implementasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pelaksanaan kalibrasi alat uji yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan rumus perhitungan indikator sebagai berikut:

IKK 7a

$$= \frac{\text{Jumlah Pemda Kab/Kota di Prov. Sumsel yang telah memiliki UPUBKB terakreditasi}}{\text{Jumlah total Pemda Kab/Kota di Prov. Sumsel}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar 76,50% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 82%, maka capaian kinerja mencapai 93,29%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.10**.



Gambar II.10. Grafik Capaian IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terhadap keselamatan transportasi darat memiliki target 82% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor antara lain:

1. Permintaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kelengkapan alat uji yang akan dilakukan kalibrasi; dan
3. Peralatan yang akan diuji sudah memiliki standar teknis.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor antara lain:

1. Tidak memiliki gedung pengujian kendaraan bermotor;
2. Tidak lengkapnya alat yang akan diuji; dan
3. Ketidakmampuan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk memenuhi fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 76,50% dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

IKK 7a

$$= \frac{\text{Jumlah Pemda Kab/Kota di Prov. Sumsel yang telah memiliki UPUBKB terakreditasi}}{\text{Jumlah total Pemda Kab/Kota di Prov. Sumsel}} \times 100\%$$

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 merupakan pelaksanaan akreditasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan, dimana telah dilaksanakan di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yaitu 1) Kota Palembang, 2) Kabupaten Banyuasin, 3) Kabupaten Musi Banyuasin, 4) Kabupaten Ogan Ilir, 5) Kabupaten Ogan Komering Ilir, 6) Kabupaten Prabumulih, 7) Kabupaten Ogan Komering Ulu, 8) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 9) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 10) Kabupaten Muara Enim, 11) Kota Lubuk Linggau, 12) Kabupaten Musi Rawas dan 13) Kabupaten Lahat. Untuk kegiatan kalibrasi alat uji pada pengujian kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan tugas dan fungsi BPTD Kelas II Sumatera Selatan telah dilaksanakan di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan antara lain 1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 2) Kabupaten Musi Rawas, 3) Kabupaten Musi Banyuasin, 4) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 5) Kabupaten Muara Enim, 6) Kabupaten Banyuasin, 7) Kabupaten Lahat, 8) Kota Palembang, 9) Kabupaten Ogan Komering Ulu, 10) Kota Prabumulih, 11) Kabupaten Ogan Ilir, 12) Kota Lubuk Linggau dan 13) Kota Pagar Alam.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 76,50%.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{13}{17} \times 100\% = 76,50\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp. Rp. 810.150.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 809.850.276,- (99,96%).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Terwujudnya deteksi pencapaian kondisi laik pakai untuk menjamin ketelitian, ketepatan alat ukur/uji dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
2. Melaksanakan monitoring ke Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memiliki akreditasi dan belum melaksanakan kalibrasi alat uji secara berkala;
3. Melakukan pengecekan terhadap alat uji untuk menjamin peralatan tersebut digunakan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan;
4. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan standar dan SOP yang telah ditentukan; dan
5. Meningkatkan kualitas SDM pengujian kendaraan bermotor melalui bimbingan teknis dan pelatihan lainnya.

Sasaran Strategis 5: SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:
IKK 5.1 : Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.

IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dihitung berdasarkan aspek penilaian meliputi:

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
- c) Aspek Keuangan; dan
- d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) beserta turunannya (Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi, Monitoring Rencana Aksi), penginputan aplikasi *e-performance* dan dokumen pendukung lainnya.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran. Rumus perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan pembobotan penilaian sebagai berikut:

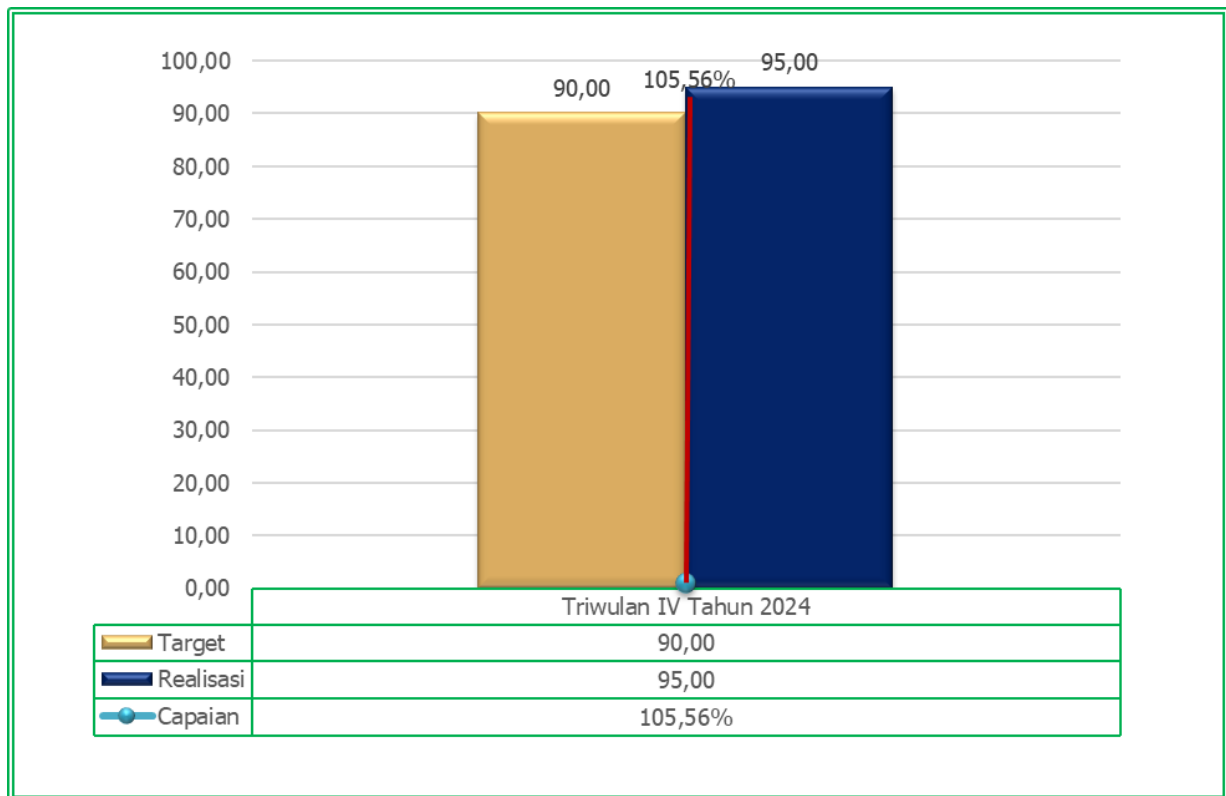
Tabel II.8 Aspek Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN	BOBOT
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%
2	Perjanjian Kinerja	5%
3	pengisian input <i>e-planning</i>	5%
4	pengisian input <i>e-performance</i>	5%
B	Indeks Profesionalisme ASN	25%
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%
2	Kompetensi	10%
3	Kinerja	8%
4	Disiplin	1%
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%
Total Nilai		100%

Sumber: BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 memiliki nilai sebesar 95 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar dengan nilai 90, maka capaian kinerja mencapai 105,56%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.11**.



Gambar II.11. Grafik Capaian IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat memiliki target senilai 90,00 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Penyelenggaraan Kinerja Kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan penunjang teknis, antara lain:

1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan;
2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan;
3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana;
4. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; dan
5. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat antara lain:

1. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang sudah ditentukan;
2. Koordinasi yang baik dengan instansi dan stakeholder terkait saat pelaksanaan kegiatan;
3. SDM yang memiliki integritas yang baik.

▪ Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat antara lain:

1. Adanya pengurangan anggaran kegiatan;
2. Tidak adanya koordinasi yang terjalin dengan baik dengan instansi dan stakeholder lainnya;
3. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan.

▪ Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 95,0 yang diperoleh dari hasil perhitungan jumlah aspek pembobotan penilaian sebagai berikut:

Tabel II.9 Hasil Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI TRIWULAN I	NILAI TRIWULAN II	NILAI TRIWULAN III	NILAI TRIWULAN IV
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	7,50%	10,00%	12,50%	23,00%
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%
2	Perjanjian Kinerja	5%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
3	pengisian input e-planning	5%	1,25%	2,50%	3,75%	5,00%
4	pengisian input e-performance	5%	1,25%	2,50%	3,75%	5,00%
B	Indeks Profesionalisme ASN	25%	18,25%	20,50%	22,75%	24,08%
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
2	Kompetensi	10%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3	Kinerja	8%	2,00%	4,00%	6,00%	7,33%
4	Disiplin	1%	0,25%	0,50%	0,75%	0,75%
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%	2,39%	7,02%	14,68%	25,00%
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%	6,25%	12,50%	18,75%	22,92%
Total Nilai		100%	34,39%	50,02%	68,68%	95,00%

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumsel (2024)

▪ Capaian Kinerja

Keberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{95}{90} \times 100\% = 105,56\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 sebesar Rp. 90.370.694.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 90.369.637.010,- atau mencapai 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat yaitu:

1. Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Melaksanakan pengelolaan naskah masuk dan keluar serta mengoreksi naskah dinas agar sesuai aturan yang berlaku;
3. Meningkatkan pengelolaan arsip baik sesuai dengan pola kearsipan; dan
4. Menyelesaikan capaian laporan bulanan, triwulanan dan tahunan berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan tepat waktu sebagai pertanggungjawaban tugas kepada pimpinan.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:
IKK 1 : Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.

IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima. Tingkat penyelenggaraan perkantoran dihitung berdasarkan:

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja);
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.

Rumus perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dengan pembobotan penilaian sebagai berikut:

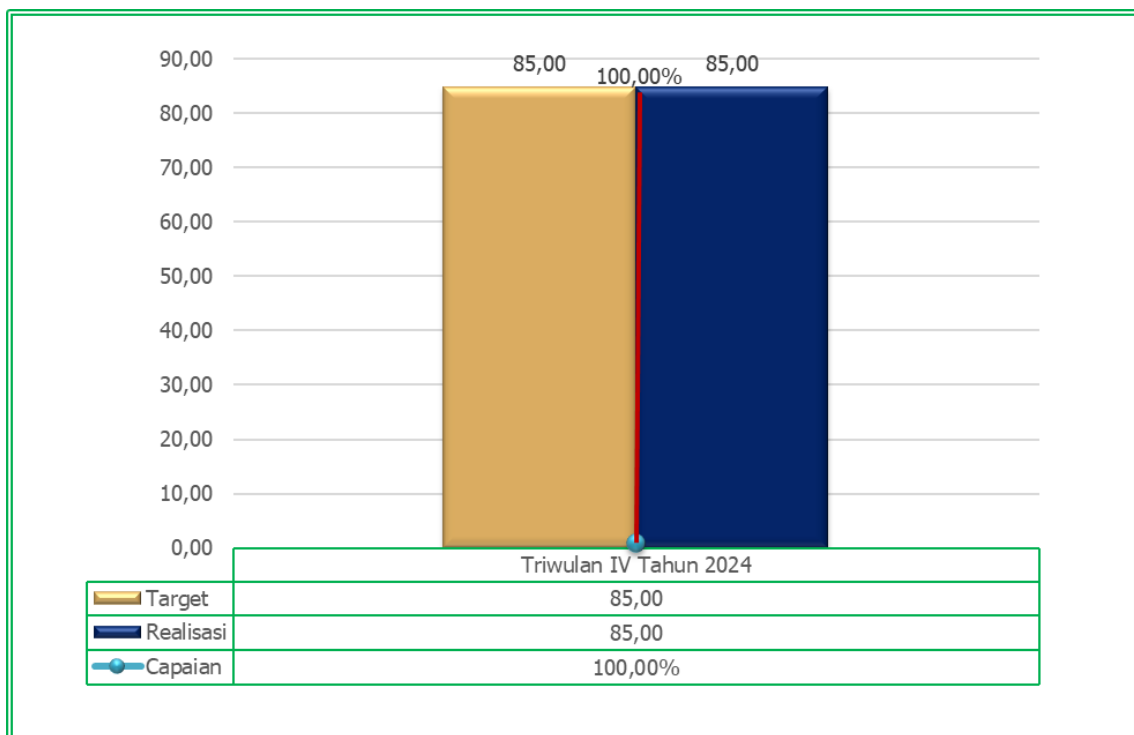
Tabel II. 10 Aspek Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

NO	URAIAN		BOBOT
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%
	1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15
Total Nilai			100%

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 memiliki nilai 85,0 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 85,0 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.12**



Gambar II.12. Grafik Capaian IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat akuntabel memiliki target 85,0 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya manajemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh pegawai di lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan. Adapun layanan perkantoran meliputi:

1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor; dan
2. Gaji dan Tunjangan.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Adanya SDM yang berintegritas dan berkompeten;
2. Komunikasi internal antar pegawai berjalan dengan baik;
3. Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran dilaksanakan sesuai jadwal; dan
4. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap bulan.

▪ Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Kurangnya SDM yang memiliki integritas yang baik dan tidak berkompeten;
2. Tidak terjalinnya komunikasi antar pegawai di masing-masing sub bagian/seksi; dan
3. Kurangnya dukungan alokasi anggaran kegiatan.

▪ Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 85,0 yang diperoleh dari hasil perhitungan jumlah aspek pembobotan penilaian sebagai berikut:

Tabel II.11 Hasil Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan
Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI TRIWULAN I	NILAI TRIWULAN II	NILAI TRIWULAN III	NILAI TRIWULAN IV
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV	25%	6,3	12,5	16,7	20,8
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	3,8	7,5	10,0	12,5
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	2,5	5,0	6,7	8,3
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	6,3	12,5	16,7	20,8
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	21,3	30,0	42,5	43,8
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x) (Jumlah Kursi dan Meja di Kantor/Jumlah Pegawai Pejabat dan Staf)	20	5,0	10,0	20,0	20,0
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y) (Jumlah PC atau Laptop di Kantor/Jumlah Pegawai Pejabat dan Staf)	15	3,8	7,5	10,0	11,3
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z) Rata-rata Kecepatan Internet/Standar Kecepatan Internet	15	12,5	12,5	12,5	12,5
Total Nilai		100%	34	55	76	85

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

▪ Capaian Kinerja

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{85,0}{85,0} \times 100\% = 100\%$$

▪ Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 memiliki target anggaran senilai Rp. 90.370.694.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp. 90.369.637.010,- atau mencapai 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat yaitu:

1. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh kepada seluruh pegawai di lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan;
2. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
3. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil pengawasan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan.

II.3 REALISASI ANGGARAN

II.2.1 Alokasi Anggaran Tahun 2024

II.2.1.1 Pagu Anggaran

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp 167.139.126.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 12 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024

RM	Rp. 113.253.096.000	67,76%
PNBP	Rp. 53.886.030.000	32,24%
SBSN	Rp. -	-
Total	Rp. 167.139.126.000	100%

Tabel II. 13 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024

Belanja Pegawai	Rp. 22.104.607.000	13,23%
Belanja Barang	Rp. 57.002.795.000	34,10%
Belanja Modal	Rp. 88.031.724.000	52,67%
Total	Rp. 167.139.126.000	100%

Terdapat pergeseran pagu *automatic adjustment* pada DIPA BPTD Kelas II Sumatera Selatan akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024. Sehingga Total Pagu pada DIPA BPTD Kelas II Sumatera Selatan pada Triwulan IV TA. 2024 adalah sebesar Rp. 176.090.836.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 14 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan IV Tahun 2024

RM	Rp. 122.305.806.000	69,50%
PNBP	Rp. 53.785.030.000	30,50%
SBSN	Rp. -	-
Total	Rp. 176.090.836.000	100%

Sumber: Data diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan

Tabel II.15 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan IV Tahun 2024

Belanja Pegawai	Rp. 29.187.711.000	16,58%
Belanja Barang	Rp. 59.086.798.000	33,55%
Belanja Modal	Rp. 87.816.327.000	49,87%
Total	Rp. 176.090.836.000	100%

Sumber: Data diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

1. Revisi DIPA ke-1
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Nomor Surat : S-114/AG/AG.3/2024
Nomor DIPA : SP DIPA- 022.03.2.403847/2024
Tanggal : 31 Januari 2024
Digital Stamp : 6070-9008-9579-0878
2. Revisi DIPA ke-2
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Nomor : S-450/WPB.07/2024
Nomor DIPA : SP DIPA- 022.03.2.403847/2024
Tanggal : 20 Februari 2024
Digital Stamp : 6070-9008-9579-0878
3. Revisi DIPA ke-3
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Nomor : S-816/WPB.07/2024
Nomor DIPA : SP DIPA- 022.03.2.403847/2024
Tanggal : 19 April 2024
Digital Stamp : 6070-9008-9579-0878
4. Revisi DIPA ke-4
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Nomor : S-1221/WPB.07/2024
Nomor DIPA : SP DIPA- 022.03.2.403847/2024
Tanggal : 28 Mei 2024
Digital Stamp : 0489-0902-0609-7688
5. Revisi DIPA ke-5
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Nomor : S-384/AG/AG.3/2024
Nomor DIPA : SP DIPA- 022.03.2.403847/2024
Tanggal : 21 Juni 2024
Digital Stamp : 9493-0566-0409-7034

6. Revisi DIPA ke-6

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Nomor : S-1888/WPB.07/2024

Nomor DIPA : SP DIPA- 022.03.2.403847/2024

Tanggal : 15 Juli 2024

Digital Stamp : 9493-0566-0409-7034

7. Revisi DIPA ke-7

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Nomor : S-506/AG/AG.3/2024

Nomor DIPA : SP DIPA- 022.03.2.403847/2024

Tanggal : 21 Agustus 2024

Digital Stamp : 6023-2083-1474-7445

8. Revisi DIPA ke-8

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Nomor : S-535/AG/AG.3/2024

Nomor DIPA : SP DIPA- 022.03.2.403847/2024

Tanggal : 30 Agustus 2024

Digital Stamp : 4078-2019-2810-0159

9. Revisi DIPA ke-9

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Nomor : S-2392/WPB.07/2024

Nomor DIPA : SP DIPA- 022.03.2.403847/2024

Tanggal : 11 Oktober 2024

Digital Stamp : 4078-2019-2810-0159

10. Revisi DIPA ke-10

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Nomor : S-2857/WPB.07/2024

Nomor DIPA : SP DIPA- 022.03.2.403847/2024

Tanggal : 15 November 2024

Digital Stamp : 7530-4459-0900-6308

11. Revisi DIPA ke-11

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Nomor : S-3120/WPB.07/2024

Nomor DIPA : SP DIPA- 022.03.2.403847/2024

Tanggal : 29 November 2024

Digital Stamp : 0410-6990-0850-0662

12. Revisi DIPA ke-12

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Nomor : S-826/AG/AG.3/2024

Nomor DIPA : SP DIPA- 022.03.2.403847/2024

Tanggal : 18 Desember 2024

Digital Stamp : 5720-3456-6114-2402

13. Revisi DIPA ke-13

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Nomor : KU.001/2/15/BPTD SUMSEL/2024

Nomor DIPA : SP DIPA- 022.03.2.403847/2024

Tanggal : 25 Desember 2024

Digital Stamp : 5720-3456-6114-2402

II.2.1.2 Revisi Anggaran Tahun 2024

Revisi Anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini berdasarkan rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

Tabel II.16 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	113.253.096.000	53.886.030.000	-	167.139.126.000
REVISI KE-1	113.253.096.000	53.886.030.000	-	167.139.126.000
REVISI KE-2	113.253.096.000	53.886.030.000	-	167.139.126.000
REVISI KE-3	113.253.096.000	53.886.030.000	-	167.139.126.000
REVISI KE-4	113.253.096.000	53.886.030.000	-	167.139.126.000
REVISI KE-5	119.258.446.000	53.886.030.000	-	173.144.476.000
REVISI KE-6	119.258.446.000	53.886.030.000	-	173.144.476.000
REVISI KE-7	119.698.286.000	53.785.030.000	-	173.483.316.000
REVISI KE-8	122.545.806.000	53.785.030.000	-	176.330.836.000
REVISI KE-9	122.545.806.000	53.785.030.000	-	176.330.836.000

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
REVISI KE-10	122.545.806.000	53.785.030.000	-	176.330.836.000
REVISI KE-11	122.545.806.000	53.785.030.000	-	176.330.836.000
REVISI KE-12	122.305.806.000	53.785.030.000	-	176.090.836.000
REVISI KE-13	122.305.806.000	53.785.030.000	-	176.090.836.000

Sumber: Data diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan

Tabel II.17 Rincian Revisi per Jenis Belanja Tahun 2024

	SUMBER DANA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	22.104.607.000	57.002.795.000	88.031.724.000	167.139.126.000
REVISI KE-1	22.104.607.000	57.002.795.000	88.031.724.000	167.139.126.000
REVISI KE-2	22.104.607.000	57.002.795.000	88.031.724.000	167.139.126.000
REVISI KE-3	22.104.607.000	57.002.795.000	88.031.724.000	167.139.126.000
REVISI KE-4	22.104.607.000	57.002.795.000	88.031.724.000	167.139.126.000
REVISI KE-5	26.580.191.000	58.646.061.000	87.918.224.000	173.144.476.000
REVISI KE-6	26.580.191.000	58.646.061.000	87.918.224.000	173.144.476.000
REVISI KE-7	26.580.191.000	59.085.901.000	87.817.224.000	173.483.316.000
REVISI KE-8	29.427.711.000	59.085.901.000	87.817.224.000	176.330.836.000
REVISI KE-9	29.427.711.000	59.085.901.000	87.817.224.000	176.330.836.000
REVISI KE-10	29.427.711.000	59.085.901.000	87.817.224.000	176.330.836.000
REVISI KE-11	29.427.711.000	59.085.901.000	87.817.224.000	176.330.836.000
REVISI KE-12	29.187.711.000	59.086.798.000	87.816.327.000	176.090.836.000
REVISI KE-13	29.187.711.000	59.086.798.000	87.816.327.000	176.090.836.000

Sumber: Data diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan

Tabel II.18 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN III	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	22.104.607.000	-	22.104.607.000	4.475.584.000	26.580.191.000	2.847.520.000	29.427.711.000	-240.000.000	29.187.711.000
Belanja Barang	57.002.795.000	-	57.002.795.000	1.643.266.000	58.646.061.000	439.840.000	59.085.901.000	897.000	59.086.798.000
· RM	40.295.660.000	-	40.295.660.000	18.096.101.000	58.391.761.000	439.840.000	58.831.601.000	897.000	58.832.498.000
· PNPB	16.707.135.000	-	16.707.135.000	-16.452.835.000	254.300.000	-	254.300.000	-	254.300.000
Belanja Modal	88.031.724.000	-	88.031.724.000	-113.500.000	87.918.224.000	-101.000.000	87.817.224.000	-897.000	87.816.327.000
· RM	34.399.994.000	-	34.399.994.000	-113.500.000	34.286.494.000	-	34.286.494.000	-	34.285.597.000
· PNPB	53.631.730.000	-	53.631.730.000	-	53.631.730.000	-101.000.000	53.530.730.000	-	53.530.730.000
· SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	167.139.126.000	-	167.139.126.000	6.005.350.000	173.144.476.000	3.186.360.000	176.330.836.000	-240.000.000	176.090.836.000

Sumber: Data diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan

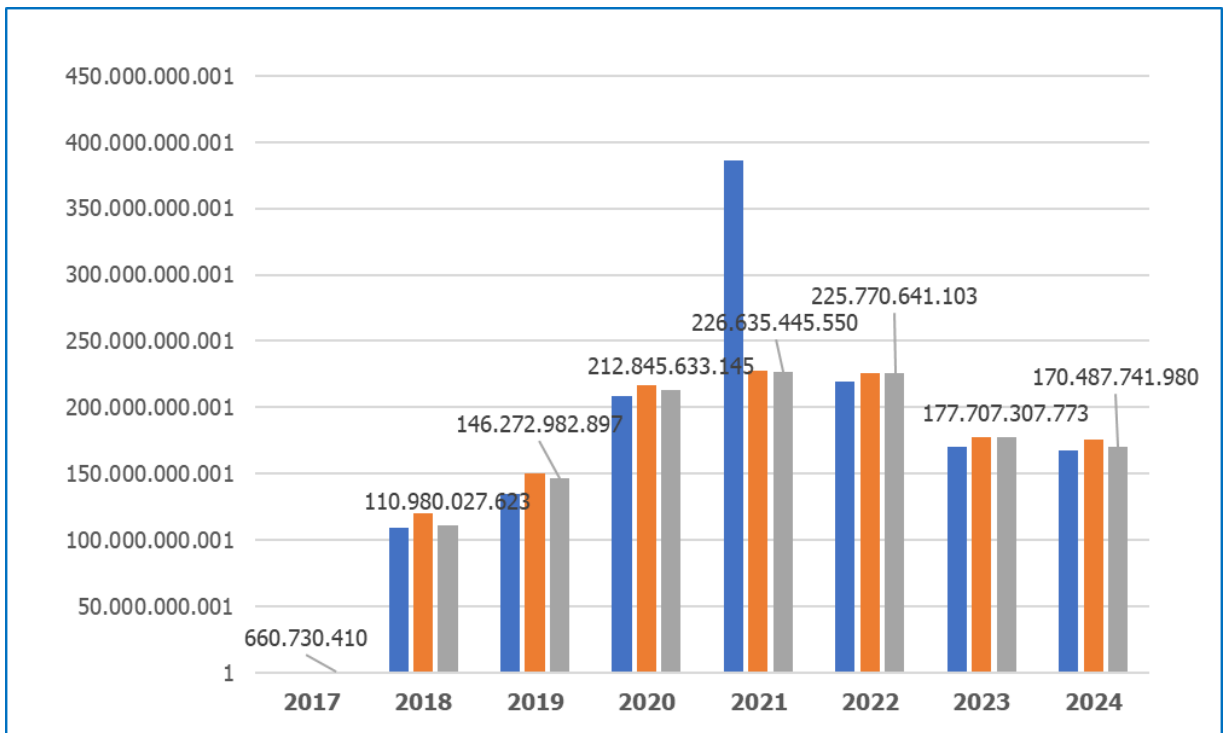
II.2.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2024

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari Tahun 2017 – 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 19 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2024

No	Tahun	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2017	669.817.000	660.730.410	98,64
2	2018	120.528.305.000	110.980.027.623	92,08
3	2019	150.004.623.000	146.272.982.897	97,51
4	2020	216.371.699.000	212.845.633.145	98,37
5	2021	227.713.955.000	226.635.445.550	99,53
6	2022	225.939.345.000	225.770.641.103	99,93
7	2023	177.722.722.000	177.707.307.773	99,99
8	2024	176.090.836.000	170.487.741.980	96,82

Sumber: BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)



Gambar II.13 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing-masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2021 anggaran yang terserap sebesar Rp226.635.445.550,- atau mencapai 99,53% dari pagu akhir Rp227.713.955.000,. Namun pada tahun 2022 terjadi kenaikan serapan anggaran yaitu sebesar Rp. 225.770.641.103,- atau mencapai 99,93%. Kemudian pada tahun 2023 terjadi kenaikan penyerapan anggaran yaitu sebesar Rp. 177.707.307.773,- atau mencapai 99,99%. Pada periode Triwulan IV Tahun 2024 penyerapan anggaran sebesar Rp. 170.487.741.980,- (96,82%).

II.2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

II.2.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II.20 Kegiatan Program Yang Ada dalam DIPA Tahun 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER	TRIWULAN I		PAGU PER	TRIWULAN II		PAGU PER	TRIWULAN III		PAGU PER	TRIWULAN IV	
			TRIWULAN I	REALISASI	%	TRIWULAN II	REALISASI	%	TRIWULAN III	REALISASI	%	TRIWULAN IV	REALISASI	%
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	167.139.126.000	167.139.126.000	48.617.515.668	29,09%	173.144.476.000	48.617.515.668	46,53	176.330.836.000	103.525.718.244	58,71%	176.090.836.000	170.487.741.980	96,82%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	139.254.126.000	139.254.126.000	5.563.091.998	3,99%	140.439.533.000	62.275.912.341	44,34	141.122.732.000	74.374.655.592	52,70%	141.122.732.000	135.601.466.751	81,74
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	34.084.861.000	34.084.861.000	588.587.099	1,73%	33.172.888.000	5.236.372.441	15,79%	33.114.165.000	17.071.001.529	51,55%	31.571.114.000	31.528.714.265	99,87%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	69.339.059.000	69.339.059.000	3.248.801.317	4,69%	70.208.755.000	9.076.749.244	12,93%	70.208.755.000	32.488.319.410	46,27%	71.927.889.000	71.764.888.511	99,77%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	30.133.694.000	30.133.694.000	899.581.736	2,99%	26.522.400.000	9.419.354.755	35,51%	31.663.460.000	20.923.705.935	66,08%	31.674.264.000	26.494.540.549	83,65%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.696.512.000	5.696.512.000	826.121.846	14,50%	5.696.512.000	2.797.255.690	49,10%	6.136.352.000	3.891.628.718	63,42%	5.949.465.000	5.813.323.426	97,71%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	27.885.000.000	27.885.000.000	11.292.465.998	40,50%	29.559.800.000	16.825.228.734	56,92	35.208.104.000	28.511.238.922	80,98%	34.968.104.000	34.886.275.229	80,9
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	109.000.000	109.000.000	7.498.000	6,88%	109.000.000	107.348.000	98,48%	109.000.000	107.348.000	98,48%	109.000.000	108.998.000	100,00%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5.671.393.000	5.671.393.000	1.532.249.889	27,02%	5.671.393.000	2.717.420.263	47,91%	5.671.393.000	4.241.516.535	74,79%	5.671.393.000	5.615.611.866	99,02%
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	22.104.607.000	22.104.607.000	9.752.718.109	44,12%	26.580.191.000	16.042.821.174	60,36%	29.427.711.000	24.162.374.387	82,11%	29.187.711.000	29.161.665.363	99,91%

Sumber: Data Diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)



II.2.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2024 yang sudah dianalisis per Triwulan IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.21 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2024

	PAGU ALOKASI TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU ALOKASI TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU ALOKASI TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU ALOKASI TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%
Belanja Pegawai	22.104.607.000	9.742.631.000	44,08	26.580.191.000	17.861.727.876	67,20	29.427.711.000	24.155.103.795	82,08	29.187.711.000	29.161.665.363	99,91
Belanja Barang	57.002.795.000	6.232.528.185	10,93	58.646.061.000	21.235.859.415	36,21	59.085.901.000	40.016.998.775	67,73	59.086.798.000	55.779.856.504	94,40
• RM	40.295.660.000	6.232.528.185	15,47	58.391.761.000	21.235.859.415	36,37	58.831.601.000	40.016.998.775	68,02	58.832.498.000	55.525.561.381	94,38
• PNBPNBP	16.707.135.000	-	-	254.300.000	-	-	254.300.000	-	-	254.300.000	254.295.123	100,00
Belanja Modal	88.031.724.000	7.498.000	,01	87.918.224.000	9.519.928.377	10,83	87.817.224.000	39.353.615.674	44,81	87.816.327.000	85.546.220.113	97,41
• RM	34.399.994.000	7.498.000	0,02	34.286.494.000	5.210.861.318	15,20	34.286.494.000	16.938.261.961	49,40	34.285.597.000	32.015.491.775	93,38
• PNBPNBP	53.631.730.000	-	-	53.631.730.000	4.309.067.059	8,03	53.530.730.000	22.415.353.713	41,87	53.530.730.000	53.530.728.338	100,00
• SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	167.139.126.000	15.982.657.185	9,56	173.144.476.000	48.617.515.668	28,08	176.330.836.000	103.525.718.244	58,71	176.090.836.000	170.487.741.980	96,82

Sumber: Data Diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2024 pada Triwulan IV sebesar **96,82%** dari Pagu Alokasi Anggaran sebesar Rp. 176.090.836.000,-.



II.2.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

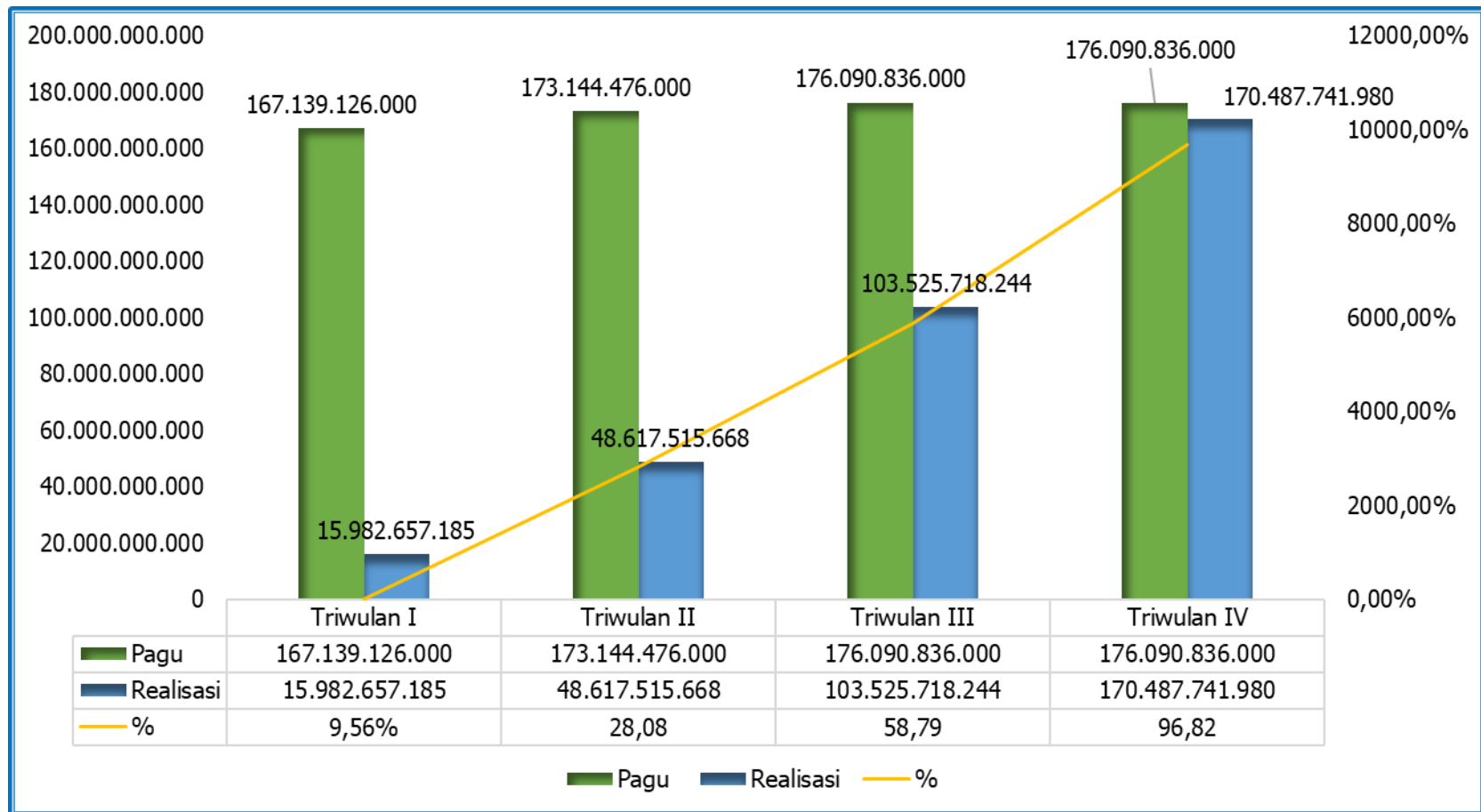
Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2024 yang sudah dianalisis per Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.22 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan IV Tahun 2024

No.	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I		PAGU ALOKASI TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II		PAGU ALOKASI TRIWULAN III	REALISASI TRIWULAN III		PAGU ALOKASI TRIWULAN IV	REALISASI TRIWULAN IV	
			Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%
1	· RM	113.253.096.000	15.982.657.185	14,11%	119.258.446.000	44.308.448.609	37,15%	122.545.806.000	81.110.364.531	66,19%	122.305.806.000	116.702.718.519	95,42%
2	· PNBPN	53.886.030.000	-	-	53.886.030.000	4.309.067.059	8,00%	53.785.030.000	22.415.353.713	41,68%	53.785.030.000	53.785.023.461	100,00%
3	· SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		167.139.126.000	15.982.657.185	9,56%	173.144.476.000	48.617.515.668	28,08%	176.330.836.000	103.525.718.244	58,71%	176.090.836.000	170.487.741.980	96,82%

Sumber: Data Diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2024 mencapai 96,82% atau sebesar Rp. 170.487.741.980 dari Pagu Alokasi Anggaran sebesar Rp. 176.487.741.980,-.



Gambar II.14 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan IV Tahun 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar **96,82%**.

II.2.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada Tahun 2024 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.23 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
1	Belanja Pegawai	29.187.711.000	29.161.665.363	26.045.637
2	Belanja Barang	59.086.798.000	55.779.856.504	3.306.941.496
3	Belanja Modal	87.816.327.000	85.546.220.113	2.270.106.887
TOTAL		176.090.836.000	170.487.741.980	5.603.094.020

Sumber: Data Diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

Tabel II.24 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
1	RUPIAH MURNI	122.305.806.000	116.702.718.519	5.603.087.481
2	PNBP	53.785.030.000	53.785.023.461	6.539
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		176.090.836.000	170.487.741.980	5.603.094.020

Sumber: Data Diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

II.2.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan IV Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.25 Efisiensi anggaran

NO.	SASARAN KEGIATAN /	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi Triwulan I	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi Triwulan II	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi Triwulan IV	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi Triwulan IV
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	73,73%	72,00%	1,73%	79,90%	65,71%	14,19%	90,60%	81,55%	9,05%	100,00%	99,99%	0,01%
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	61,42%	59,44%	1,98%	99,50%	76,28%	23,22%	99,50%	78,87%	20,63%	104,40%	100,00%	4,40%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	23,41%	27,32%	-3,90%	66,83%	30,40%	36,43%	69,91%	47,00%	22,91%	107,31%	94,94%	12,37%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	38,21%	64,84%	-26,63%	55,58%	109,77%	-54,19%	76,31%	59,91%	16,40%	105,56%	100,00%	5,56%
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	40,00%	150,39%	-110,39%	64,71%	135,08%	-70,38%	89,41%	107,90%	-18,49%	100,00%	99,94%	0,06%
TOTAL		47,36%	74,80%	-27,44%	73,30%	83,45%	-10,15%	85,15%	75,05%	10,10%	103,45%	98,98%	4,48%

Sumber: Data Diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 103,45%, dengan realisasi anggaran rata-rata sebesar 98,98%, dimana hal ini menunjukkan adanya efisiensi antara rata-rata kinerja dengan rata-rata keuangan sebesar 4,48%.

II.2.4 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala yang ada antara lain masih belum terrealisasinya beberapa kegiatan sehingga daya serap anggaran tidak terserap secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan adanya blokir automatic adjustment dari Kementerian Keuangan sebesar Rp. 5.312.167.000,- (*Lima Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) pada kegiatan berikut ini (Tabel III.66), sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dan berdampak pada penurunan daya serap anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel II.31 Kegiatan Yang Terkena Blokir *Automatic Adjustment* Tahun 2024

NO.	KEGIATAN	NILAI (Rp.)
1	Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan	665.000.000
2	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (4M) Type 2: Terminal End Lengkung	2.250.000.000
3	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (UK.3X120 mm) (Thermoplastic), pada 4 (empat) ruas jalan:	
	- Ruas 009 Bts Kayu agung - Sp. Penyandingan	400.000.000
	- Ruas 020 Bts. Kota Lahat- Muara Enim	400.000.000
	- Ruas 027-028 Sp. Inderalaya - Bts. Kab. Ogan Ilir - Kab. Muara Enim - Bts Kota Prabumulih	683.060.000
	- Ruas 030 Sp. Belimbing - Bts. Kota Muara Enim	400.000.000
4	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) pada Ruas Jalan Desa Muara Teladan Kab. Musi Banyuasin (14 Unit)	343.000.000
5	Layanan Keperintisan Angkutan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan dengan trayek:	
	- Terminal Sp. Periuk - Simpang 9 Cecar	11.984.000
	- Terminal Simpang Periuk - Muara Rupit - Simpang Nibung	11.127.000
	- Simpang Periuk - Rupit - Karang Dapo - Rawas Ilir	19.166.000
6	Perjalanan Dinas	128.830.000
Total		5.312.167.000

Sumber: Data Diolah BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

BAB III

Penutup



Penutup

III.1 Penutup

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kegiatan. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.





Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 ini terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2024. Terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 100,0 (target 100,0);
 - b. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 7,0 (target 7,0);
 - c. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 6,0 (target 6,0);
 - d. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A sebesar terealisasi sebesar 29,87 (target 25,0);
 - e. Persentase penerapan SMART terminal tipe-A terealisasi sebesar 51,42 (target 55,0);
 - f. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP terealisasi sebesar 60,13 (target 60,0);
 - g. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 79,10 (target 80,0);
 - h. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 18,83 (target 16,0);
 - i. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 1300,0 (target 840,0);
 - j. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 76,50 (target 82,0);
 - k. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 90,0 (target 95,0); dan
 - l. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 85,0 (target 85,0).
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *zero accident*.



III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Tanggung Jawab

Hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini.

Tabel III.1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUN G JAWAB
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi darat dan keterpaduan antarmuda transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
			IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	7	7	7	100%	TERCAPAI	Memastikan dan memonitor pelaksanaan Terminal Tipe-A yang telah beroperasi	- Seksi Prasarana

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
											mendapatkan dukungan operasional SDM dan anggaran	
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	6	6	6	100%	TERCAPAI	Memastikan dan memonitor pelaksanaan Pelabuhan SDP yang telah beroperasi mendapatkan dukungan operasional SDM	- Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	25	25	29,87	119,48%	TERCAPAI	Memastikan dan memonitor pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A telah berjalan dan mendapatkan	- Seksi Prasarana

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
											dukungan SDM dan anggaran	
			IKK2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	55	55	51,42	93,49%	TIDAK TERCAPAI	Memastikan dan memonitor penerapan SMART Terminal Tipe A telah berjalan dan mendapatkan dukungan SDM dan anggaran untuk meningkatkan prasarana di Terminal Tipe A melalui system digitalisasi	- Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	60	60	60,13	100%	TERCAPAI	Memastikan dan memonitor pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP telah berjalan	- Seksi Prasarana

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUN G JAWAB
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
											dan mendapatkan dukungan SDM dan anggaran	
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	80	80	79,10	98,88%	TIDAK TERCAPAI	Memastikan dan memonitor perlengkapan jalan yang telah Terpasang terhadap kondisi ideal telah berjalan dan mendapatkan dukungan SDM dan anggaran	- Seksi Lalin
			IKK3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	16	18,83	82,31%	TIDAK TERCAPAI	Memonitor secara berkala pelaksanaan pelanggaran di UPPKB yang beroperasi dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar	- Seksi Lalin

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
											ketentuan penimbangan	
			IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1300	1300	840	154,76%	TERCAPAI	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan transportasi jalan melalui semua media sosial dan kampanye keselamatan transportasi jalan	- Seksi Sarana
			IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82	82	76,50	92,29%	TIDAK TERCAPAI	Melakukan pendampingan Ditjen Hubdat pada pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit	- Seksi Sarana

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
											Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota di Prov. Sumsel dan melakukan kalibrasi alat uji secara berkala ke semua Pemda Kab/Kota di Prov. Sumsel.	
4	SK5	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	90	95	105,56%	TERCAPAI	Memastikan dan memonitor penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat telah berjalan dan mendapatkan dukungan SDM dan anggaran	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Sub Bagian Tata Usaha

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUN G JAWAB
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
5	SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	85	85	100%	TERCAPAI	Memastikan dan memonitor penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat telah berjalan dan mendapatkan dukungan SDM dan anggaran	- Sub Bagian Tata Usaha

Sumber: Data Diolah BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
1	NURHADI UNGGUL WIBOWO, ST. M T	19711116 199803 1 002	Pembina Tingkat I (IV/b)
2	TULUS RAHARJO, A.TD., M.Si.	19680119 199301 1 001	Pembina (IV/a)
3	MILFER JONELIY, S.Kom., M.Si.	19760215 200701 1 019	Penata Tk.I (III/d)
4	YULIANA YENNY SORTA PANJAITAN, S.Si.T., M.M.	19790701 200112 2 005	Pembina (IV/a)
5	HERRY SAPUTRA, S.Si.T., M.Si.	19851025 200902 1 002	Penata Tk.I (III/d)
6	NUR IDA FITRIANTI, S.SIT., M.SC	19870525 201012 2 001	Penata Tk.I (III/d)
7	HANDOYO WICAKSONO, S.S.T (TD)	19920527 201503 1 001	Penata (III/c)
8	ANJAS GUMELAR, A.Md LLASDP., S.S.T (TD)	19930612 201402 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)
9	HUSNI THAMRIN, A.Md.	19760513 200812 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)
10	TRI JULIAN SARI, S.E.	19930727 201402 2 001	Penata Muda (III/a)
11	HANUM DWI OKTAVIA, A.Md.LLASDP, S.ST (TD)	19931011 201503 2 002	Penata Muda (III/a)
12	RENALDY DIANTORO SUNARDI	20000619 202310 1 002	Penata Muda (III/a)
13	ALDI RENALDI, A.Md. LLASDP	19940622 202012 1 012	Pengatur (II/c)
14	MOHAMAD SYARIF RAMADHAN, A.Md.	19981222 202203 1 005	Pengatur (II/c)
15	LIANA SYAPUTRI, A.Md.	19970201 202203 2 021	Pengatur (II/c)
16	ANITA DWI MARTINI, A.Md.Tra	19991128 202302 2 001	Pengatur (II/c)
17	ABDI PERMANA, A.Md. Tra	19990918 202203 1 003	Pengatur (II/c)
18	ALYA NUR SAMSIYANI, A.Md.T.	19970717 202203 2 024	Pengatur (II/c)
19	SRI YOSHI WAHYUNI, A.Md , LLASDP	19950617 202203 2 018	Pengatur (II/c)
20	ROISSATUL KAMILA, A.Md. Tra	20000313 202203 2 003	Pengatur (II/c)
21	M. RAMA FARHANSYAH, A.Md LLASDP	19981022 202203 1 007	Pengatur (II/c)
22	IRMA NURLIYA DINA, A.Md, LLASDP	19930117 202203 2 009	Pengatur (II/c)
23	RAFIKA OCTAVIANI	20020708 202310 2 001	Pengatur (II/c)
24	MARTHASARI	19940829 202203 2 017	Pengatur (II/c)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
25	TANTI PRAPITA SARI	19930223 202203 2 011	Pengatur (II/c)
26	ANANDA PRATAMA, A.Md LLASDP	19970324 202203 1 011	Pengatur (II/c)
27	AMALIA MORLEYNDA KARUANA, A.Md LLASDP	19950129 202203 2 013	Pengatur (II/c)
28	M RIDHO ALFARIDZI, AMd. Tra	19990524 202203 1 006	Pengatur (II/c)
29	AHMAD FARHAN ALENOVANDI, A.MD LLASDP	19951105 202203 1 007	Pengatur (II/c)
30	FADEL MUHAMMAD, S.Pd	-	-
31	HERNI NOVIANA, S.Sos	-	-
32	NYAYU ERIKA MIRANDA, SE	-	-
33	RAHMAT LUFIE, S.Sn	-	-
34	SINDY PANGESTY, S.ST	-	-
35	SEPTRIA, A.Md	-	-
36	ACHMAD JAYADI HARJO, A.Md.	-	-
37	AFRILIANA PUSPITA SARI, S.Sos	-	-
38	DINO RIZALDI	-	-
39	FAJRI SANTOSO	-	-
40	NURAINI	-	-
41	TRI KARNO	-	-
42	REZKY MANDALA PUTRA	-	-
43	AIDIL FIRMANSYAH	-	-
44	NETTO YUSTISI	-	-
45	EKO SAPUTRA ISMUNANDAR, S.Sos	-	-
46	AJI PRASETYO UTOMO	-	-
47	SAIDI, SE	19720403 200604 1 001	Penata Tk. I (III/d)
48	ZUL AFNAN, S.H., M.Si.	19880418 201001 1 004	Penata Tk. I (III/d)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
49	INDRA BRILIAN, S.ST (TD)	19860517 200812 1 001	Penata (III/c)
50	YUNI FITRI YANTI, S.E., M.Si.	19870602 201503 2 002	Penata Muda Tk.I (III/b)
51	MUHAMMAD ICHSAN, S.ST	19941221 201902 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)
52	ZULHADI, S.T.	19870121 201503 1 007	Penata Muda (III/a)
53	DERA GADING TEGAR WIJAYA, S.Tr.Tra	19991027 202210 1 001	Penata Muda (III/a)
54	M. RIDUAN, A.MD LLASDP, S.M.	19930104 201503 1 002	Penata Muda (III/a)
55	KHARISMA NUR ISMAWANTI	19991117 202310 2 001	Penata Muda (III/a)
56	HAFIZHUL ULYA SUMARNO, S.ST.	19980508 202012 1 004	Penata Muda (III/a)
57	DWI CHINDY ROCKY ANGELI SIAHAAN, A.Md Tra	19991102 202112 2 001	Pengatur (II/c)
58	PRAYOGA SURYA PRATAMA, A.MD TRA	19980719 202112 1 001	Pengatur (II/c)
59	VAMZA ANFAQO, A.Md.Tra	20010809 202210 1 002	Pengatur (II/c)
60	JULIANA KARTIKA PUTRI, A.Md LLASDP	19910723 202203 2 008	Pengatur (II/c)
61	WIDYA DWI PUSPITA, A.Md LLASDP	199606202022032000	Pengatur (II/c)
62	RAHMAT ARYADI, A.Md., LLASDP	19940419 202203 1 005	Pengatur (II/c)
63	MUHAMMAD YOGI JUANDA	19990823 202203 1 002	Pengatur Muda (II/a)
64	YUNILA DEWI ROHMA, A.Md	-	-
65	YUNIA ADITRI, A.Md.PKB	-	-
66	ERWANSYAH JASLAN, S.Kom	-	-
67	BIMA ARIF OKTIANTO, S.Pd., M.Si	-	-
68	IWAN SUTRISNO	-	-
69	THOMAS SIGRO WASONO	-	-
70	M ILHAM PRATAMA	-	-
71	ADYONA DHEGA PRADIPTA	-	-
72	TEUKU REZA MOENZIER, SH, MM	19790902 200012 1 003	Penata Tk.I (III/d)
73	RICO SAPUTRA, SH, M.SI	19860210 201001 1 018	Penata Tk.I (III/d)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
74	IMAM ARIEFURRACHMAN, AMD LLASDP, ST	19861016 200912 1 002	Penata Tk.I (III/d)
75	WENDHY OKUMURA SAPUTRA	19900412 201101 1 001	Penata (III/c)
76	CHERLY SARTIKA, ST	19870504 200912 2 008	Penata (III/c)
77	LILI SURYAMAN, A.MD.TK., S.T.	19820131 200912 1 004	Penata Muda Tk.I (III/b)
78	DEDY BANTORO, S.H.	19901226 201503 1 002	Penata Muda (III/a)
79	DWI ANGGRAINI, A.MD.LLASDP	19930708 201503 2 003	Penata Muda (III/a)
80	BHARA DHEWA KUSUMAH, S.Tr.Tra	20000511 202210 1 002	Penata Muda (III/a)
81	HABSARI AGUARISTI TAMA, A.Md. LLASDP	19910208 20180 1 2001	Pengatur Tk.I (II/d)
82	ADI TIA KRISNA SAPUTRA, A.MD. PKB	19921023 201801 1 001	Pengatur Tk.I (II/d)
83	MUHAMMAD SAIFU ROHMAN, A.Md. Tra	19991017 202302 1 001	Pengatur (II/c)
84	LUTHFI FADHILAH, A.Md TRa	20000630 202112 1 002	Pengatur (II/c)
85	M. RAKEN AL ZUHRA, A.Md.T.	20020302 202210 1 001	Pengatur (II/c)
86	HALIM PUTU NUGROHO, A.Md.Tra	20010911 202210 1 001	Pengatur (II/c)
87	KHOIRUNNISA	20010609 202310 2 001	Pengatur (II/c)
88	IKHWAN NASRI ZAIN, A.Md.,LLASDP	19941224 202203 1 007	Pengatur (II/c)
89	EVA JUNITA SARI, A.Md PKB	19990630 202321 2 004	PPPK Gol. VII
90	INDRA AMANDO, A.Ma PKB	19890819 202321 1 016	PPPK Gol. VI
91	INNES ASTITI, SE	-	-
92	FITRIA ANGGRAINI, ST	-	-
93	M. ALVIN NAHDY, SH	-	-
94	OKDY PRADANA, A.Md.,Tra	-	-
95	FIRDAUS, A.Md LLAJ	19860214 200903 1 006	Penata Muda Tk.I (III/b)
96	SEPTIANSAH, A.MD LLASDP, S.E., M.Si.	19900912 201402 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)
97	AKHMAD FAUZAN, S.Tr.Tra	19980104 202203 1 000	Penata Muda (III/a)
98	OSMI ALINA SIMANJUNTAK, SE	19880724 202012 2 008	Penata Muda (III/a)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
99	MUHAMMAD RODIATAMMARDHI, A.Md.	19960712 202203 1 007	Pengatur (II/c)
100	YOES MEARNI, A.Md	19960520 202012 2 005	Pengatur (II/c)
101	MUHAMMAD NUR FAJAR, A.Md.	19900923 202203 1 005	Pengatur (II/c)
102	MONICA LISDAYANI BR SIBORO, A.Md T	19970103 202203 2 011	Pengatur (II/c)
103	SHELLA FREDIANO, A.MD TRA	19990913 202112 1 001	Pengatur (II/c)
104	IKA AGUSTIN BR TARIGAN, A.Md.Tra	20010820 202210 2 001	Pengatur (II/c)
105	SEVTA PUJI LESTARI	19930930 202203 2 016	Pengatur (II/c)
106	ANISA SAVIRA PUTRI	20021002 202310 2 001	Pengatur (II/c)
107	SHINTA APRILIANI	20020416 202310 2 003	Pengatur (II/c)
108	M. ASROL ISBAHUDDIN, S.ST	-	-
109	WAHYU IBRAHIM, S.H	-	-
110	WELLA FRANSISKA, S.E.	-	-
111	ERDIWANSA, SH	19710612 199602 1 001	Penata Tk. I (III/d)
112	RAMLAN,SH	19850715 200801 1 001	Penata Tk. I (III/c)
113	FEBIANZA, S.E.	19720229 200303 1 007	Penata Tk. I (III/c)
114	ARGANI R	19711017 199803 1 003	Penata Muda (III/a)
115	KHALIDA ELLIYANA,A.Md LLAJ,S.M	19901123 201503 2 005	Penata Muda (III/a)
116	MUHAMMAD BARUN TARISNA	19720418 200701 1 028	Pengatur Tk. I (II/d)
117	SEPTI FAJRIANI, A.MD.PKB	19970912 201902 2 001	Pengatur Tk. I (II/d)
118	RISANDI	19831006 200701 1 002	Pengatur Tk. I (II/d)
119	YANDHI MAUBARA,Sos	19781229 201407 1 002	Pengatur (II/c)
120	RIDWAN ATMAJA	19801011 202321 1 004	PPPK Gol.V
121	DEVINA JULIKA, SE	-	-
122	AGUNG YULIANTO	-	-
123	ALDO FIKRIANSYAH, S.Kom	-	

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
124	ANDRI MISNIANSYAH	-	-
125	ANNISA KURNIA RIZKI, A.Md.Keb	-	-
126	BAMBANG IRAWAN	-	-
127	DENDI FERDIANSYAH	-	-
128	DENY SAPUTRA	-	-
129	DESI ARIANIA, SE	-	-
130	FAISAL	-	-
131	HADI SURYANTO	-	-
132	HERLINA AGUSTININGSIH, A.Md	-	-
133	HERWIN SATRIA, SH	-	-
134	JUPRIYADI	-	-
135	MUHAMMAD ABDILLAH RIDLO	-	-
136	MUHAMMAD ASRIADI	-	-
137	PITRY, A.Md	-	-
138	RA RODIAH, A.Md.Keb	-	-
139	RAHMA MARISKA TAMA	-	-
140	RIZKY ARDIANSYAH	-	-
141	RUDI HARTONO, SE	-	-
142	SOEHENDRA LIYANDA SUBRATA, S.PD.I	-	-
143	SUMANTRI	-	-
144	YOSEPH RICHARD MARTIN SINAGA, A.Md	-	-
145	DINAH TAQIYYAH, S.Tr.T	-	-
146	PASHA JAMAL	-	-
147	INDAH ISLAMIATI	-	-
148	LENI MARLINA	-	-

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
149	M.ARDYANSYAH	-	-
150	CHRISTINA ASTARIA LUMBAN RAJA	-	-
151	FUAD SANTOSO	-	-
152	M. NOPRI TRISLI, S.H., M.Si.	19671125 200604 1 004	Penata Tk. I (III/d)
153	HERI MARDIANSYAH	19680304 199603 1 001	Penata Tk. I (III/d)
154	ALAMSYAH TOYIB, S.H	19790310 200701 1 005	Penata Tk. I (III/d)
155	ARISTOTELES, S.H.	19700403 200501 1 009	Penata Tk. I (III/d)
156	RICKY OKTARIZANO, S.H.	19841020 200801 1 001	Penata (III/c)
157	ARDI SANTI SEPRIDA., S.E.	19860914 201001 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)
158	IWAN DASUAN	19720705 201407 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)
159	WENDI MUDA PAHLAWAN	19751229 200801 1 004	Pengatur Tk I (II/d)
160	BUDI SETIAWAN, SE	-	-
161	NYIMAS AMRINA, SH	-	-
162	NABELA SEPTRIANA, SE	-	-
163	LIA SARI	-	-
164	ZALFIS	-	-
165	APRIYANTO	-	-
166	LAMSANI CHANDRA UTAMA	-	-
167	AHMAD FUAD, A.Md.Par	-	-
168	DARMAN HALOMOAN GULTOM, SE	-	-
169	RADEN MUHAMMAD ADI SURAWIJAYA	-	-
170	LINGGA JAYA SAPUTRA, SH	-	-
171	RUDY ALAMSYAH, SE	-	-
172	NURIAH	-	-
173	UMAR BAKRI	-	-

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
174	ALI BABA	-	
175	HERYADI PRASTYO	-	-
176	ZULKIFLI	-	-
177	MUHAMMAD AGUNG FEBRIANSYAH	-	-
178	BATERA ARI SAPUTERA	-	-
179	RICO THAMFANI	-	-
180	ARI NATA NEGARA	-	-
TERMINAL TIPE A KAYU AGUNG			
181	ABDUL KARIM, S.Sos	19710526 200801 1 001	Penata Tk. I (III/d)
182	ANDY ARIES, Ssos	19790211 200701 1 009	Penata Tk. I (III/d)
183	SOPAN, SH	19721208 200801 1 001	Penata (III/c)
184	AMIR FAISOL, S.Sos	19770615 200604 1 013	Penata (III/c)
185	SAIFUL ANWAR, S.Sos	19721124 200801 1 003	Penata (III/c)
186	MARZALI HARUN	19680301 200801 1 006	Penata Muda (III/a)
187	ISMET ARPANDI	19740605 200701 1 012	Pengatur Tk I (II/d)
188	LAMBARA TITO, A.Md.T	19981025 202203 1 008	Pengatur (II/c)
189	DIDI RIZALDI, A.Md.T	19980902 202203 1 009	Pengatur (II/c)
190	ANDI AZIZ	-	-
191	ANDI SAPUTRA	-	
192	ARBANI WIJAYA	-	-
193	BAMBANG KUSNADI	-	-
194	BAYUMI	-	-
195	BERRY PURNAMA, S.Sos	-	-
196	DEDDY SURYA KENCANA	-	-
197	DESLINA	-	-

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
198	ELYANI	-	-
199	PAUSI	-	-
200	HANDONO	-	-
201	ISKANDAR	-	
202	JUJUN SAPUTRA	-	-
203	KARSUDIN, S.E	-	-
204	KOWI	-	-
205	M. DIKI SATRIYAN	-	-
206	M. SOLEH	-	-
207	MUHAMMAD ELLANDRA	-	-
208	RADEN AHMAD MUHAMMAD	-	-
209	SAIFUL	-	-
210	SATRIA BUDI	-	-
211	SONI RIYAWANTO	-	
212	SOPIAN	-	-
213	WIDYA MARCELLY, A.Md	-	-
214	YOKI PRAGUSLEO, SH	-	-
215	SYAHRIL HIDAYAT	-	-
216	DEFI YANUS, S.H	-	-
217	ARDINATA, SE	19700418 199303 1 005	Penata Tk. I (III/d)
218	FIARISA AUGUSTA CRISTIANI,S.M	19830820 200901 2 005	Penata Muda (III/a)
219	AHMAD HERIYADI	19811204 200604 1 004	Pengatur Tk. I (II/d)
220	NUR ASYIQIN HAMDANI	19751102 200701 1 018	Pengatur (II/c)
221	ZULFIKRI	19840630 200701 1 002	Pengatur (II/c)
222	AL QORI ASRI, A.Md., LLASDP	19951206 202203 1 011	Pengatur (II/c)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
223	ABDUR ROHIM	-	-
224	AZLIA CHANDRA, SP	-	-
225	CITRA SARI DEWI, A.Md	-	-
226	MERRY YANTI	-	-
227	MUSTIRAAINI, S.Pd	-	-
228	ORIZA MELANDONA, S.Pi	-	-
229	RIA AMBARWATI	-	-
230	SISNI AIDA	-	-
231	UJANG BRUCLE, S.IP	-	-
232	SENTI MARISKA, SE	-	-
233	MEINI FITRIANA, S.Pd	-	-
234	JUMIOS FIKRI, SE	-	-
235	INDIKUSNADI, SM	-	-
236	DEDI ANSORI	-	-
237	FIFIN MARSEDES, SE	-	-
238	RIFKI ALIMIN	-	-
239	YULANDRA WIJAYA, A.Md	-	-
240	WAHYU PRAMANA PUTRA, SE	-	-
241	ARI WENDRA, SE	-	-
242	ARI EFANDRA, ST	-	-
243	AGUNG KALLINGGA	-	-
244	DIANSYAHRI	19750321 199403 1 003	Penata Tk. I (III/d)
245	HIRAS SAHAT MARPAUNG	19690706 199112 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)
246	AHMAD MUDA	19840327 200801 1 001	Penata Muda (III/a)
247	SARIYANDI	19810929 200901 1 005	Pengatur Tk. I (II/d)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
248	ANDI SAPUTRA	-	-
249	ANDI SOPI	-	-
250	ANDRIE OKTA	-	-
251	ANTONIUS JATMIKO	-	
252	DIKA SATRIA	-	-
253	IYAN APRIANSAH, S.Ip	-	-
254	JIMMI DESTA	-	-
255	JULIUS S, SP	-	
256	LEDI FIRMANSYAH	-	-
257	LISA OKTARINA	-	-
258	MUHAMMAD BAYU PRIONO	-	-
259	MUHAMMAD ANDI FIRMAN AFFARDI, SH	-	-
260	MUFID ALKAUTSAR	-	-
261	ROBI HANDIKO	-	-
262	RUSDI	-	-
263	SAROPAL	-	-
264	SUKENDI	-	-
265	TAUFIQ NURRAHMAN, S.E	-	-
266	YUDHI IRAWAN, A.Md	-	-
267	ARIF RACHMAN, SE	-	-
268	AJI SUKMA	-	-
269	IRWAN THOMASRUL, SH	-	-
270	EVANS SEPTIYAN	-	-
271	DENNY TRI ADRIANSYAH	-	-
272	PURNA WIJAYA	19720818 200701 1 011	Penata (III/c)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
273	FERI IRAWAN,SH	19740716 201309 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)
274	FITRIANSYAH,SE	19731011 200701 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b)
275	EKO WINTORO,SE	19800513 200801 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)
276	NOFRIANSYAH	19691117 199103 1 004	Penata Muda (III/a)
277	ASMADI JUARSAH	19680503 200801 1 002	Pengatur Tk. I (II/d)
278	AFRIZAL DARUSALIN, A.Md.,LLASDP	19950413 202203 1 015	Pengatur (II/c)
279	TAUPIK	19721016 200701 1 004	Pengatur (II/c)
280	ANTON YULIANSAH	19830729 201309 1 001	Pengatur Muda Tk.I - II/b
281	CECEP AGUS SUGARYO, S.Pd	-	-
282	MARTA HADI SAPUTRA	-	-
283	OKTA PARIANSAH, S.Kom	-	-
284	RIKI YANI, S.Ikom	-	-
285	SATRIA WIJAYA, A.Md	-	-
286	MAMAN PRATAMA, S.SOS	-	-
287	KRISNA SANDI	-	-
288	M. SA'AD UJANG, SE	19710210 200701 1 031	Penata Tk. I (III/d)
289	DIAN WULAN SARI, SE	19870107 200903 2 006	Penata Tk. I (III/d)
290	MUJI ASIH SRIASTUTI, A. Md. T.	19990827 202203 2 013	Pengatur (II/c)
291	YANSORI	19730207 201309 1 001	Pengatur (II/c)
292	M. NASIRWAN	19831124 201309 1 001	Pengatur (II/c)
293	INCENT OKTAVIA	19981010 202321 1 010	PPPK Gol V
294	ANUNG AMARTO WICAKSONO	-	-
295	HENDRI	-	-
296	CHARLIE PRAYOGI	-	-
297	IMAM WAHYUDI, SE	-	-

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
298	ANDRI	-	-
299	MAHARDIKA YUDHA, SE	-	
300	BENNY	-	
301	MUHAMMAD HAULI	-	-
302	SUGIHARTA	-	
303	YOGI PRATAMA	-	-
304	GILANG RAMADHAN	-	-
UPPKB MERAPI			
305	DARUAN	19671009 199302 1 001	Penata Tk. I (III/d)
306	OCTADIAZ ROHILZA	19801006 200801 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)
307	YASIR ARAPAT	19770510 200604 1 021	Penata Muda (III/a)
308	DEDI FIRMASYAH	19770822 200801 1 002	Pengatur Tk. I (II/d)
309	ANANDA IKHWANU IKROM	20011119 202203 1 006	Pengatur Muda (II/a)
310	EDUAR RISADI	-	-
311	IRWANSYAH	-	
312	DENIS OGALA	-	-
313	HAMUDIN	-	-
314	MULYADI	-	-
315	WAWAN NAHROWI SAPUTRA	-	-
316	REZA GUNAWAN	-	-
317	SUWANTRI RIZAL EFENDI	-	-
318	ALAN BUDI KUSUMA	-	-
319	FERI ANDIKA	-	-
320	ROHMAT FERYONO	-	-
321	BENY AFRI ASTIAWAN	-	-

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
322	SUHARDI	-	-
323	KARTIKA WATI, SH. M.Si	19800424 200701 2 008	Penata Tk. I (III/d)
324	DAVID A SIMATUPANG, S.E., M.M.	19830922 201001 1 014	Penata Tk. I (III/d)
325	INDRA KUSUMA, S.T	19750528 200901 1 009	Penata Tk. I (III/d)
326	MUHAMMAD UTOYO, A.Md LLASDP, S.T	19910203 201402 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)
327	AFRIZAL, S.E	19800404 200801 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b)
328	FADRIL WIJAYA, S.M.	19810914 201309 1 001	Penata Muda (III/a)
329	ANANDA PERMATA PUTRI, A.Md PKB	19961102 202203 2 014	Pengatur (II/c)
330	SHEILA TRINANDA S, A.Md.LLASDP	19981005 202012 2 004	Pengatur (II/c)
331	DESI RISMAWATI, A.Md.T	19991209 202203 2 006	Pengatur (II/c)
332	M.FAQIHUDDIN LUTFI,A.Md.T	19980511 202203 1 010	Pengatur (II/c)
333	ANANTA SETYA KUMARA, A.Md.T	20011012 202310 1 001	Pengatur (II/c)
334	I GEDE ADITYA SASTRA WIGUNA, A.Md. Log	20000116 202310 1 001	Pengatur (II/c)
335	YAHYA HAIDAR HELMI LAKSANA, A.Md Tra	20020401 202310 1 001	Pengatur (II/c)
336	FATHIA RAHMANIA, A.Md., LLASDP	19981130 202203 2 006	Pengatur (II/c)
337	ANAS GARINDRA, A.Md. Tra	20010825 202210 1 003	Pengatur (II/c)
338	WANDA MUTIARA ANOM	20000325 202203 2 003	Pengatur (II/c)
339	M. FAISAL GUNTARA	-	-
340	SYADZA YASMINRA, A.Md LLASDP	-	-
341	M. ABDI ISLAMI DESMANA SUBRATA	-	-
342	ZURNI AKMAL	-	-
343	M. FAUZAN HIDAYAT	-	-
344	ARIP ARIPIN,S.Sos	-	
345	MIRA KRISNA	-	
346	RIZKI ROMADHON	-	-

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
347	DEDI SUPRIADI	-	-
348	EKA SETIA APRIANSYAH	-	-
349	FFIRDAUS IRSAN	-	-
350	ADELIA TRIANI	-	-
351	RANGGA BRAWIJAYA, SE	19800531 201001 1 008	Penata Tk. I (III/d)
352	SALMAN ALFARISI, S.KOM	19771015 201101 1 001	Penata (III/c)
353	M. NUR, S.H	19821225 200701 1 007	Penata Muda Tk. I (III/b)
354	SARWOEDI	19840227 201001 1 001	Penata Muda (III/a)
355	PUSAKA, SH	19791006 200901 1 008	Penata Muda (III/a)
356	HADI FACHRIZAL, ST	19900610 201503 1 004	Penata Muda (III/a)
357	MUHAMMAD RACHMAD	19770617 200801 1 003	Pengatur Tk. I (II/d)
358	ASRONI	19790511 201001 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)
359	LINGGA LIER HARDINI, A.MD PKB	20000311 202203 2 003	Pengatur (II/c)
360	BAGAS TRI UTOMO, A.MD T	19991113 202112 1 002	Pengatur (II/c)
361	ALVIN NOOR LAKSONO, A.MD T	19990603 202210 1 001	Pengatur (II/c)
362	MOHAMMAD FAHREZI HIDAYAT, A.MD. T	20020119 202310 1 001	Pengatur (II/c)
363	RANDES WARDOYO	19970402 202203 1 006	Pengatur (II/c)
364	MUHAMMAD WAZIR QOWI HASIBUAN	19981016 202203 1 005	Pengatur (II/c)
365	MOCH. AKBAR KURNIA PUTRA, A.Md LLASDP	19941018 202203 1 009	Pengatur (II/c)
366	RAMADHAN VALENTINO, A.Md LLASDP	19960214 202203 1 014	Pengatur (II/c)
367	ATIQOH ASTARINI, A.Md. LLASDP.	19981029 202203 2 013	Pengatur (II/c)
368	FEBRY FRIDYAN SYAH	20000204 202203 1 005	Pengatur Muda (II/a)
369	M APRILLUDIN	19800430 200701 1 003	Juru Tk. I (I/d)
370	MERRY PUJI HARTATI, ST	-	-
371	SUSILAWATI, S.PD	-	-

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
372	M. BAGUS ANSAR, A.MD	-	
373	M. HASBI	-	-
374	FENGKY JONIANSYAH	-	-
375	ALEX YUANTO	-	-
376	RAJA S HARAHAHAP	-	-
377	IHSANTIA FAUZIAH	-	-
378	PINGKI ANGGA DEWA, S.H	-	
379	HENDRAWATI	-	-
380	ISTANTIA SOFIYA, S.Kep	-	-
381	ISWAN AFRIYANTO	-	-
382	JONI IRAWAN	-	-
383	DODI AFRIANSYAH	-	
384	PANJI SYAHPUTRA, S.Sos	-	-
385	DWI LOSIANI SARI DEWI, S.P	-	-
386	MUHAMMAD SAID, S.P	-	-
387	FAHRIYADI,ST.,MM	19770903 200012 1 002	Pembina (IV/a)
388	MUHLAS UJIAN TO	19680518 198903 1 002	Pembina (IV/a)
389	BUDI PRASETYO, S.SIT., M.M.	19780808 200012 1 003	Pembina (IV/a)
390	MUHAMMAD RASYID,S.HUT	19730321 200604 1 006	Penata Tk. I (III/d)
391	ZULKARNAIN GUMAY,S.SOS	19720219 200801 1 001	Penata Tk. I (III/d)
392	DESSY FADDHILA, A.Md	19901221 201402 2 008	Penata Muda (III/a)
393	ARIE ANGGRAINI, ST	19910815 201801 2 001	Penata Muda (III/a)
394	CUT DELLA NITA PRATIWI,A.Md.,LLASDP	19941205 202203 2 015	Pengatur (II/c)
395	NURUL DAMAYANTI,A.Md.,LLASDP	19891207 202203 2 009	Pengatur (II/c)
396	TRI MEYLA DAMAYANTI,A.Md.,LLASDP	19980528 202203 2 020	Pengatur (II/c)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
397	KIKI RIZKY AMELIA	19951109 202203 2 019	Pengatur (II/c)
398	BETA JULIANTI, A.Md .LLASDP	19940714 202203 2 024	Pengatur (II/c)
399	<u>MUHAMMAD FAHRI AL FARISI, A.Md. T</u>	20010606 202210 1 001	Pengatur (II/c)
400	HERIMANTO,SH	-	
401	ICHSAN EFENDI,SH	-	-
402	YOFI RAHMASYAH,SE	-	-
403	ARRAFIQ KHOTAM	-	
404	FEBRI ANDY	-	-
405	ISWANTO	-	-
406	YUDI ARTA	-	-
407	KARTA DINATA KUSUMA WIJAYA	-	-
408	HENDRA WIJAYA, A.Md	-	-
409	MERIYA SANGKUT, SE	-	-
410	MELSI ALIKA SALSABILA	-	-
411	<u>ANSYORI, SH. M.SI</u>	19761113 200312 1 002	Penata Tk. I (III/d)
412	RUPIT WIJAYA, A.MD.LLASDP	19810209 200212 1 005	Penata (III/c)
413	YUDHO MINARSO	19790118 200901 1 007	Pengatur Tk. I (II/d)
414	LEO ARDIYANTO, A.Md. LLASDP	19950207 202203 1 010	Pengatur (II/c)
415	MUHAMMAD DHARMAWAN, A.Md. T	20000619 202210 1 001	Pengatur (II/c)
416	M. GENO SATRIA, A.Md LLASDP	19931102 201503 1 001	Penata (III/a)
417	RIZQI AMELIA, A.Md. Tra	20011215 202210 2 001	Pengatur (II/c)
418	MEGA APRIYANTI	-	-
419	KARNEDI AMIN	-	
420	DAVID YUNUS SINAGA	-	-
421	MUHAMMAD BAHRAIN NUUR	-	-

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
422	FITRA FAJRIANTO	-	-
423	ANUGRAH DWI PAKUALAM	-	-
424	INDRA JAYA SETIA	-	-
425	RICKY RACHMAN	-	-
426	YAHYA HERLIYANTO	-	-
427	ANDIKA RAHMAN	-	-
428	ARDIANSYAH	-	-
429	FRANSNIKO SIMAMORA, A.Md Pel	-	-
430	MUHAMMAD KHADAFI, ST	19880508 201001 1 003	Penata Tk. I (III/d)
431	MASAGUS THABRANI, S.E	19690629 200604 1 001	Penata Tk. I (III/d)
432	NURMALA HELEN, S.E.	19760309 200701 2 006	Penata (III/c)
433	ELINDA SEPTIANI, S. ST(TD)	19910908 201402 2 003	Penata (III/a)
434	ELIK KARMILA SARI	-	-
435	ERWANTO PASARIBU, SH	-	-
436	ZULJALALI IKROM, SE	19831218 201309 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)
437	AMRIZAL	-	-
438	RENGKI LANOPEN	-	-
439	SUMIYATI, S.Pd	-	-
440	AFRIZAL, SE	-	-
441	PUTRI MARHELIASARI	-	-
442	TRI NURFAULINZA, S.Si.T	19860803 201001 2 016	Penata Tk. I (III/d)
443	JONI JUNAIDI	19790515 200604 01 030	Penata Muda (III/a)
444	DEBI ARMANDA, S.Sos	-	-
445	WARI RAKARMAN, SE	-	-
446	ANDI APRIYANTO	-	-

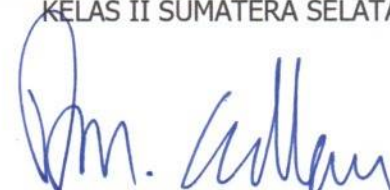
NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.
447	DENNY MURSILO, SH	19781223 200701 1 004	Penata Tk. I (III/c)
448	ACHMAD DENSI, SE	19691222 199103 1 004	Penata Tk. I (III/d)
449	ATHIA KIRANA, A.Md	19880809 202203 2 003	Pengatur (II/c)
450	FRANS VEDRY WIRANATA	-	-
451	BRIYANT SAMUEL HUTAPEA, S.H.	-	-
452	EFRAN ARBI, SE	-	-
453	SUKARDI, S.H., M.SI	19690120 199101 1 001	Pembina (IV/a)
454	EFRIA DIAMETRI, S.Sos	-	-
455	SEPTI AYU WULANDARI, A.Md	-	-
456	MUHAMMAD AMROL ZULPALESA	-	-
457	MUHAMMAD RIZAL	-	-
458	YOZEF ERLANDIA	-	-
459	RAMA FAJAR	-	-
460	RAMOT S.	-	-

RENCANA KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
2.	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	65
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	13
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1300
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Palembang, 04 Januari 2024

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN



DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Denny Michels Adlan, S.T., M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 4 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

DENNY MICHELS ADLAN, ST., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
2.	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	65
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	13
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1300
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan**Anggaran**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	34.084.861.000,-
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	69.339.059.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	30.133.694.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.696.512.000,-
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.671.393.000,-
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp.	22.104.607.000,-

Disetujui

Palembang, 4 Januari 2024

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

DENNY MICHELS ADLAN, ST., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 9 Juni 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K
NRP. 66110433

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
2.	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	25
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	16
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan**Anggaran**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	33.215.165.000,-
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	70.208.755.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	31.663.460.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	5.696.512.000,-
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	109.000.000,-
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.671.393.000,-
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	26.580.191.000,-

Disetujui

Palembang, 9 Juni 2024

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera SelatanIrjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K.
NRP. 66110433NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002



REVISI II PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sumatera Selatan Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi II Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Nur Ida Fitrianti	Penyusun Rencana dan Pelaporan	24/11/2024	
2.	Diperiksa	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	26/11/2024	
3.	Disetujui	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	26/11/2024	
4.	Disetujui	Yuliana Y.S. Panjaitan, S.SiT., M.M.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	26/11/2024	
5.	Disetujui	Milfer Joneliy, S.Kom., M.Si.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	26/11/2024	
6.	Disetujui	Herry Saputra, S.SiT., M.Si.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	26/11/2024	



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 4 Desember 2024

Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan

NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
2.	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	25
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	16
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

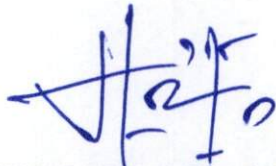
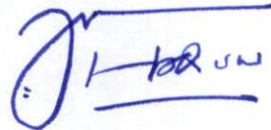
Kegiatan**Anggaran**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	31.389.977.000,-
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	71.932.943.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	31.663.460.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	6.136.352.000,-
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	109.000.000,-
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.671.393.000,-
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	29.427.711.000,-

Disetujui

Palembang, 4 Desember 2024

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

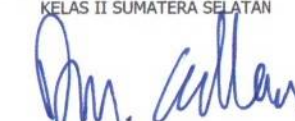
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera SelatanAHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												Anggaran	Total Anggaran	Penanggung Jawab		
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	4,084,861,000	4,084,861,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana	
		2	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12,960,555,000	12,960,555,000	- Seksi Prasarana	
		3	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3,992,280,000	3,992,280,000	Seksi Prasarana	
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	12,960,555,000	12,960,555,000	Seksi Prasarana	
		2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	65	Operasional Terminal Tipe A Alang-Alang Lebar	0	0	10	20	25	30	35	40	45	55	60	65	2,676,290,000	2,676,290,000	Seksi Prasarana	
		3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	100	35,000,000	35,000,000	Seksi Prasarana	
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	20	40	60	80	80	80	80	80	80	80	80	3,430,000,000	28,277,710,000	Seksi Lalin	
						2	Pemeliharaan perlengkapan Jalan	0	0	0	0	30	50	80	80	80	80	80	80		2,865,570,000	Seksi Lalin
						3	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Prov. Sumsel dan Prov. Babel)	10	20	30	40	50	70	80	80	80	80	80	80		21,982,140,000	Seksi Lalin
		2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	13	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	0	0.45	0.86	1.31	1.72	2.17	2.62	3.03	5	6.5	8.2	13	2,744,523,000	2,744,523,000	Seksi Prasarana	
		5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1300	Penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	0	0	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	Seksi Sarana	
		7	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	Pelaksanaan dan Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	80	95,000,000	95,000,000	Seksi Sarana	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												Anggaran	Total Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	5,096,512,000	5,096,512,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1 Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	85	5,531,393,000	27,636,000,000	Subbag Tata Usaha
					2 Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	85	22,104,607,000		Subbag Tata Usaha

Palembang, 09 Januari 2024
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN

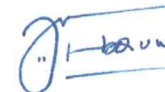

DENNY MICHELS ADLAN, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												Anggaran	Total Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	3,215,165,000	3,215,165,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		2 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12,992,700,000	12,992,700,000	- Seksi Prasarana
		3 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3,960,135,000	3,960,135,000	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	12,992,700,000	12,992,700,000	Seksi Prasarana
		2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55	Operasional Terminal Tipe A Alang-Alang Lebar dan Terminal Tipe A Karya Jaya	0	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	4,230,299,000	4,230,299,000	Seksi Prasarana
		3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	6.66	13.33	20	26.66	33.33	40	46.66	53.33	60	66.66	73.33	80	35,000,000	35,000,000	Seksi Prasarana
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1 Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	20	40	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3,470,000,000	26,549,620,000	Seksi Lalin
					2 Pemeliharaan perlengkapan Jalan	0	0	0	0	30	50	80	80	80	80	80	80	3,500,270,000		Seksi Lalin
					3 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Prov. Sumsel)	10	20	30	40	50	70	80	80	80	80	80	80	19,579,350,000		Seksi Lalin
		2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Merapi, UPPKB Talang Kelapa, dan UPPKB Kertapati	1.3	2.66	4	5.33	6.66	8	9.33	10.66	12	13.33	14.66	16	3,622,006,000	3,622,006,000	Seksi Prasarana
		5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840	Penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	0	0	350,000,000	350,000,000	Seksi Sarana
		7 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82	Pelaksanaan dan Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	82	254,300,000	254,300,000	Seksi Sarana

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												Anggaran	Total Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengendalian dan Pengendalian Prasarana; Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	5,096,512,000	5,096,512,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1 Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	85	5,671,393,000	32,251,584,000	Subbag Tata Usaha
					2 Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	85	26,580,191,000		Subbag Tata Usaha

Palembang, 26 Juni 2024
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN



NURHADI UNGGUL WIBOWO, ST.MT.
NIP. 19711116 199803 1 002

REVISI II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAT PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												Anggaran	Total Anggaran	Pemerangang Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar moda Transportasi	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	3,215,165,000	3,215,165,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12,940,287,000	12,940,287,000	- Seksi Prasarana
		Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4,112,548,000	4,112,548,000	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Excellent Service Terminal Penumpang Tipe A	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	869,696,000	869,696,000	Seksi Prasarana
		Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55	Operasional Terminal Tipe A Alang-alang lebar dan Terminal Tipe A Karya Jaya	0	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	4,804,217,000	4,804,217,000	Seksi Prasarana
		Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	60	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	35,000,000	35,000,000	Seksi Prasarana
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	Persentase perlingkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1. Bantuan Teknis Perlingkapan Jalan 2. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan 3. Pengadaan dan Pemasangan Perlingkapan Jalan (Prov. Sumsel)	20	40	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2,942,365,000	24,115,850,000	Seksi Lalin
		Persentase pelaksanaan pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	1,3	2,66	4	5,33	6,66	8	9,33	10,66	12	13,33	14,66	16	4,274,289,000	4,274,289,000	Seksi Lalin
		Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840	Penyenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000,000	350,000,000	Seksi Sarana
		Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82	Pelaksanaan dan Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	82	577,000,000	577,000,000	Seksi Sarana
					Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Uji Kendaraan Bermotor	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	82	254,300,000	254,300,000	Seksi Sarana

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												Anggaran	Total Anggaran	Pemangpin Jawab
						Bulan-3	Bulan-2	Bulan-1	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1 Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	4,924,352,000	90,587,597,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
					2 (Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru)	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	29,899,000,000		
					3 Sistem Layanan Transportasi Darat	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	12,000,000,000		
					4 Pelabuhan Sungai di Rehabilitasi	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	40,386,224,000		
					5 Patroli yang Diperasikan	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	2,669,021,000		
					6 Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	600,000,000		
					7 Perangkat Pengelola Data dan Informasi (Dukungan Penyelenggaraan)	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	90	109,000,000		
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1 Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	85	5,671,393,000	35,099,104,000	Subbag Tata Usaha
					2 Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	0	8	16	25	32	40	48	60	68	75	80	85	29,427,711,000		Subbag Tata Usaha

Palembang, 03 Desember 2024
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN

NURHADI UNGGUL WIBOWO, ST.MT.
NIP. 19711116 199803 1 002

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		% Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Jumlah produksi per hari dan ritase	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	8	8%	340,405,083	8%	8	0	100.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Data Realisasi Angkutan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minumum (SPM)	7	100%	1,080,046,250	8%	7	14,988,832	100%	0.1%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Data Realisasi Pelabuhan SDP	Pemenuhan Standar Pelayanan Minumum (SPM)	6	100%	332,690,000	8%	6	6,239,663	100%	0.2%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Standar Pelayanan Minumum (SPM)	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minumum (SPM) di Terminal Tipe A	8	8%	1,080,046,250	8%	8	14,988,832	100%	0.1%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	65	Operasional Terminal Alang-Alang Lebar	Data Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal	Terpenuhinya fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal	0	0%	223,024,167	8%	0	7,494,416	0%	0.3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	0	0%	2,916,667	8%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1) Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang mendapatkan bantuan teknis	20	8%	285,833,333	8%	20	0	100.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						2) Pemeliharaan perlengkapan Jalan	Data Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	0	8%	238,797,500	8%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						3) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Prov. Sumsel dan Prov. Babel)	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	10	8%	1,831,845,000	8%	10	0	100.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	13	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Data Pelanggaran UPPKB	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i>	0	0%	228,710,250	8%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin

		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1300	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	Laporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pekan keselamatan transportasi jalan	0	0%	29,166,667	8%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pelaksanaan dan Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpenuhiya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	0	0%	7,916,667	8%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1) Pengelolaan Bidang Ketatausahaan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	0	100%	424,709,333	8%	0	41,412,528	0%	0.8%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	-Seksi Lalin -Seksi Sarana -Seksi Prasarana -Subbag TU
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1) Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	0	100%	460,949,417	8%	0	42,491,860	0.0%	0.8%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha
						2) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Layanan Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	0	100%	1,842,050,583	8%	8	1,800,823,493	0.0%	8.1%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-10				Realisasi Bulan-10		% Capaian Bulan-10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	1) Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Jumlah produksi per hari dan ritase	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	1	80%	1	80%	1	1,259,039,724	73%	73%	Evaluasi trayek/rute yang tidak terdapat produksi penumpang per hari agar direncanakan untuk dialihkan ke trayek/rute lain yang belum terlayani angkutan umum	Monitoring produksi per hari dan ritase angkutan perintis	LLAJ
					Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Babel	Jumlah produksi per hari dan ritase	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	1	85%	1	85%	1	3,061,219,289	74%	74%	Evaluasi trayek/rute yang tidak terdapat produksi penumpang per hari agar direncanakan untuk dialihkan ke trayek/rute lain yang belum terlayani angkutan umum	Monitoring produksi per hari dan ritase angkutan perintis	LLAJ
		2) Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	Subsidi Angkutan Antarmoda KSPN Tj. Kelayang	Jumlah produksi per hari dan ritase	Terpenuhinya pelayanan angkutan antarmoda pada daerah KSPN	1	75%	1	75%	1	1,398,383,480	67%	67%	Evaluasi trayek/rute yang tidak terdapat produksi penumpang per hari agar direncanakan untuk dialihkan ke trayek/rute lain yang belum terlayani angkutan umum	Monitoring produksi per hari dan ritase angkutan perintis	LLAJ
		3) Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Data Realisasi Angkutan di Terminal	Pemenuhan Standar Pelayanan Minumum (SPM)	8	1	8	1	8	9,098,274,339	75%	75%	Tidak ada	Percepatan penyerapan anggaran setiap bulan untuk keperluan operasional terminal	LLAJ
		4) Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	1) Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Penyeberangan Penumpang Ro-Ro 150 GT Lintas Sri Menanti – Karang Baru (Termasuk Supervisi)	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	1	100%	1	100%	1	5,585,423,000	100%	100%	Tidak ada	Pekerjaan telah selesai	TSDP
					2) Pembangunan Pelabuhan Sungai Sri Menanti Tahap IV (Termasuk Supervisi)	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Pelabuhan Penyeberangan	1	90%	1	90%	1	7,160,231,279	72%	72%	Tidak ada	Optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan	TSDP
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	6) Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Data Realisasi Pelabuhan SDP	Pemenuhan Standar Pelayanan Minumum (SPM)	7	1	7	1	7	797,943,041	47%	47%	Tidak ada	Percepatan penyerapan anggaran setiap bulan untuk keperluan operasional terminal	TSDP
		1) Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pelaksanaan dan Pengawasan Bidang LLAJ	Data produksi kendaraan dan penumpang di terminal	Terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat akan pelayanan di terminal	1	80%	1	80%	1	90,674,280	83%	83%	Perlu dilakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan kegiatan bidang LLAJ dan percepatan realisasi anggaran kegiatan	Monitoring secara intensif pelaksanaan kegiatan	LLAJ
		2) Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	20	Pembangunan Fasilitas Pelayanan Terminal Tipe A Alang-alang Lebar Kota Palembang Tahun 2022 - 2023	Data Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal	Terpenuhinya fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal	1	0%	1	0%	1	0	0%	0%	Perlu dilakukan proses percepatan pelaksanaan kegiatan	Percepatan pemenuhan fasilitas utama dan penunjang di terminal	LLAJ

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-10				Realisasi Bulan-10		% Capaian Bulan-10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		3) Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	1) Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	1	80%	1	80%	1	114,702,398	72%	72%	Tidak ada	Koordinasi intensif dengan instansi terkait pelaksanaan kegiatan	TSDP
					2) Lanjutan Peningkatan Pelabuhan Sungai 16 Ilir Palembang (Program Quick Wins) Termasuk Supervisi	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Pelabuhan Penyeberangan	1	40%	0	40%	0	2,437,875,300	29%	29%	Tidak ada	Optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan	TSDP
					3) Peningkatan Pelabuhan Sungai 7 Ulu Palembang (Program Quick Wins)	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Pelabuhan Penyeberangan	1	85%	1	85%	1	15,203,289,111	46%	46%	Tidak ada	Optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan	TSDP
					4) Peningkatan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api Tahap II (MYC)	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Pelabuhan Penyeberangan	1	85%	1	85%	1	49,148,049,726	72%	72%	Tidak ada	Optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan	TSDP
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	1) Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1) Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel (termasuk supervisi)	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	1	40%	1	40%	1	751,680,000	64%	64%	Tidak ada	Optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan	LLAJ
					2) Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Prov. Babel (termasuk supervisi)	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	1	40%	1	40%	1	302,976,000	7%	7%	Tidak ada	Optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan	LLAJ
					3) Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel (termasuk supervisi)	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	1	30%	1	30%	1	0	0%	0%	Tidak ada	Optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan	LLAJ
					4) Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Prov. Babel (termasuk supervisi)	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	1	30%	1	30%	1	0	0%	0%	Tidak ada	Optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan	LLAJ
					5) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel dan Prov. Babel (termasuk supervisi)	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	1	60%	1	60%	1	6,461,237,282	35%	35%	Tidak ada	Optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan	LLAJ
		2) Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	10	1) Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Data Operasional UPPKB	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i>	1	5%	1	75%	1	1,898,269,235	5%	74%	Tidak ada	Percepatan penyerapan anggaran setiap bulan untuk keperluan operasional terminal	SARPRAS
					2) Pelaksanaan dan pengawasan bidang sarana dan prasarana perhubungan darat	Data Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i>	1	5%	1	5%	1	63,468,461	5%	67%	Tidak ada	Koordinasi intensif dengan instansi terkait dalam pengawasan sarana dan prasarana	SARPRAS

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-10				Realisasi Bulan-10		% Capaian Bulan-10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					3) Pelaksanaan rampcheck	Data Inspeksi Keselamatan LLAJ	Meningkatnya keselamatan LLAJ	1	5%	1	5%	1	41,101,620	5%	45%	Tidak ada	Koordinasi intensif dengan instansi terkait dalam pengawasan sarana dan prasarana	SARPRAS
		3) Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6) Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7) Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	1) Perawatan, Pemeliharaan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi	Data alat uji yang sudah dikalibrasi	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan permotor	1	40%	1	40%	1	79,561,470	25%	31%	Tidak ada	Optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan	SARPRAS
					2) Pelaksanaan dan Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan permotor	1	45%	1	25%	1	17,469,689	26%	26%	Tidak ada	Perencanaan yang optimal dalam pelaksanaan standarisasi pengujian kendaraan bermotor	SARPRAS
		8) Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran Kegiatan	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	1	68	10	68%	1	2,840,848,669	53%	53%	Tidak ada	Optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan	TU/LLAJ/ SARPRAS/ TSDP
					Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	1	68	10	68%	1	6,680,911,202	57%	57%	Tidak ada	Optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan	TU/LLAJ/ SARPRAS/ TSDP
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	2) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	1	68	10	68%	1	4,542,000	4%	4%	Tidak ada	Optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan	TU/LLAJ/ SARPRAS/ TSDP
					3) Layanan Perkantoran	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	1	68	15	68%	1	16,586,998,997	76%	76%	Tidak ada	Optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan	TU/LLAJ/ SARPRAS/ TSDP

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		% Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Jumlah produksi per hari dan ritase	Terpenuhiya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	16	17%	680,810,167	17%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Data Realisasi Angkutan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minumum (SPM)	7	100%	2,160,092,500	17%	7	1,341,295,075	100%	10.3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Data Realisasi Pelabuhan SDP	Pemenuhan Standar Pelayanan Minumum (SPM)	6	100%	665,380,000	17%	6	269,146,517	100%	6.7%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Standar Pelayanan Minumum (SPM)	Terpenuhiya Standar Pelayanan Minumum (SPM) di Terminal Tipe A	16	17%	2,160,092,500	17%	16	1,341,295,075	100%	10.3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	65	Operasional Terminal Alang-Alang Lebar	Data Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal	Terpenuhiya fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal	0	0%	446,048,333	17%	0	284,423,142	0%	10.6%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan SDP	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhiya SPM Kapal Penyeberangan	10	17%	5,833,333	17%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1) Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang mendapatkan bantuan teknis	40	17%	571,666,667	17%	40	0	100.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						2) Pemeliharaan perlengkapan jalan	Data Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	0	17%	477,595,000	17%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						3) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	20	17%	3,663,690,000	17%	20	0	100.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	13	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Data Pelanggaran UPPKB	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i>	0.45	2%	457,420,500	17%	0.45	424,499,405	100.0%	15.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1300	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	Laporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pekan keselamatan transportasi jalan	0	0%	58,333,333	17%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana

		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pelaksanaan dan Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	10	13%	15,833,333	17%	10	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1) Pengelolaan Bidang Ketatausahaan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	8	17%	849,418,667	17%	8	372,885,586	100.0%	7.3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	-Seksi Lalin -Seksi Sarana -Seksi Prasarana -Subbag TU
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1) Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	16	17%	921,898,833	17%	16	690,557,745	100.0%	12.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha
						2) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Layanan Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	16	17%	3,684,101,167	17%	16	5,668,070,434	100.0%	25.6%	Capaian Output Sudah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		% Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Jumlah produksi per hari dan ritase	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	24	25%	758,861,250	25%	24	588,587,099	100.0%	19.4%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	- Seksi Lalin - Seksi Sarana	3,035,445,000
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Data Realisasi Angkutan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minumum (SPM)	7	100%	3,145,999,500	25%	7	2,660,389,064	100%	21.1%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana	12,583,998,000
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Data Realisasi Pelabuhan SDP	Pemenuhan Standar Pelayanan Minumum (SPM)	6	100%	1,092,209,250	25%	6	588,412,253	100%	13.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana	4,368,837,000
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Standar Pelayanan Minumum (SPM)	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minumum (SPM) di Terminal Tipe A	24	25%	3,145,999,500	25%	24	2,660,389,064	100%	21.1%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana	12,583,998,000
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	65	Operasional Terminal Alang-Alang Lebar	Data Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal	Terpenuhinya fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal	10	25%	603,387,000	25%	10	565,790,858	100%	23.4%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana	2,413,548,000
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	20	25%	8,750,000	25%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana	35,000,000
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1)	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang mendapatkan bantuan teknis	60	25%	857,500,000	25%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin	3,430,000,000
						2)	Pemeliharaan perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	0	25%	716,392,500	25%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin	2,865,570,000
						3)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	30	25%	5,495,535,000	25%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin	21,982,140,000
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	13	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Data Pelanggaran UPPKB	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension</i> dan <i>Over Loading</i> (ODOL)	0.86	3%	686,130,750	25%	0.86	809,944,816	100.0%	29.5%	Capaian Output Sudah Optimal dab Capaian Anggaran Melebihi Target	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin	2,744,523,000
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1300	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	Laporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pekan keselamatan transportasi jalan	0	0%	87,500,000	25%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana	350,000,000

		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pelaksanaan dan Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpenuhiya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	15	20%	23,750,000	25%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana	95,000,000
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1) Pengelolaan Bidang Ketatausahaan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	16	25%	1,274,128,000	25%	16	826,121,846	100.0%	16.2%	Capaian Output Sudah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	-Seksi Lalin -Seksi Sarana -Seksi Prasarana -Subbag TU	5,096,512,000
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1) Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	16	25%	1,417,848,250	25%	16	690,557,745	100.0%	12.2%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha	5,671,393,000
						2) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Layanan Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	16	25%	5,526,151,750	25%	16	9,752,718,109	100.0%	44.1%	Capaian Output Sudah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Subbag Tata Usaha	22,104,607,000

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-4				Realisasi Bulan-4		% Capaian Bulan-4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Jumlah produksi per hari dan ritase	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	32	33%	1,011,815,000	33%	24	486,259,099	75.0%	16.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Data Realisasi Angkutan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minumum (SPM)	7	100%	4,194,666,000	33%	7	3,398,247,924	100%	27.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Data Realisasi Pelabuhan SDP	Pemenuhan Standar Pelayanan Minumum (SPM)	6	100%	1,456,279,000	33%	6	896,497,953	100%	20.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Standar Pelayanan Minumum (SPM)	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minumum (SPM) di Terminal Tipe A	32	33%	4,194,666,000	33%	27	3,398,247,924	84%	27.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	65	Operasional Terminal Alang-Alang Lebar	Data Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal	Terpenuhinya fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal	20	33%	804,516,000	33%	15	718,048,858	75%	29.8%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	30	33%	11,666,667	33%	20	3,750,000	67%	10.7%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana

3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1)	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang mendapatkan bantuan teknis	80	33%	1,042,333,333	33%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						2)	Pemeliharaan perlengkapan jalan	Data Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	0	33%	1,166,756,667	33%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						3)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	40	33%	6,324,930,000	33%	0	2,778,593,400	0.0%	14.6%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	13		Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Data Pelanggaran UPPKB	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i>	1.31	4%	914,841,000	33%	1.31	1,069,815,316	100.0%	39.0%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1300		Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	Laporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pekan keselamatan transportasi jalan	0	0%	116,666,667	33%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80		Pelaksanaan dan Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpenuhnya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	20	27%	84,766,667	33%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1)	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	25	33%	1,698,837,333	33%	37	1,930,854,402	148.0%	37.9%	Capaian Output Sudah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	-Seksi Lalin -Seksi Sarana -Subbag TU
						2)	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	25	33%	1,890,464,333	33%	25	1,883,048,139	100.0%	33.2%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1)	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	25	33%	1,890,464,333	33%	25	1,883,048,139	100.0%	33.2%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha
						2)	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Layanan Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	25	33%	7,368,202,333	33%	53	11,862,971,684	212.0%	53.7%	Capaian Output Sudah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-5				Realisasi Bulan-5		% Capaian Bulan-5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab													
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran																
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)														
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Bersentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Jumlah produksi per hari dan ritase	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	40	42%	1,264,768,750	42%	32	892,803,266	80.0%	29.4%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	- Seksi Lalin - Seksi Sarana													
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7															Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Data Realisasi Angkutan	7	100%	5,413,625,000	42%	7	4,280,380,570	100%	32.9%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6															Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Data Realisasi Pelabuhan SDP	6	100%	1,650,056,250	42%	6	1,084,705,794	100%	27.4%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	40	42%	5,413,625,000	42%	32	4,280,380,570	80%	32.9%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana													
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	65	Operasional Terminal Alang-Alang Lebar	Data Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal	Terpenuhinya fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal	25	42%	971,258,750	42%	20	895,582,406	80%	38.4%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana													
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	40	42%	14,583,333	42%	39	13,750,000	98%	39.3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana													
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1)	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang mendapatkan bantuan teknis	80	42%	1,302,916,667	42%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin												
						2)	Pemeliharaan perlengkapan Jalan		Data Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	30	42%	1,458,445,833	42%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin											
						3)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel		Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	50	42%	7,906,162,500	42%	14	2,778,593,400	28.0%	14.6%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin											
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	13	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Data Pelanggaran UPPKB	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i>	1.72	5%	1,143,551,250	42%	1.72	1,234,106,677	100.0%	45.0%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin													
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1300	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	Laporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pekan keselamatan transportasi jalan	0	0%	145,833,333	42%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana													

		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	80	Pelaksanaan dan Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	25	33%	105,958,333	42%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1) Pengelolaan Bidang Ketatausahaan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	32	42%	2,123,546,667	42%	37	2,395,575,867	115.6%	47.0%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	-Seksi Lalin -Seksi Prasarana -Subbag TU
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1) Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	32	42%	2,363,080,417	42%	32	2,448,438,619	100.0%	43.2%	Capaian Output sudah optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha
						2) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Layanan Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	32	42%	9,210,252,917	42%	53	13,915,023,365	165.6%	63.0%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-6				Realisasi Bulan-6		% Capaian Bulan-6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Jumlah produksi per hari dan ritase	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	48	50%	1,517,722,500	50%	35	1,067,936,582	72.9%	35.2%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Data Realisasi Angkutan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	7	100%	6,496,350,000	50%	7	4,486,456,559	100%	34.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Data Realisasi Pelabuhan SDP	Pemenuhan Standar Pelayanan Minumum (SPM)	6	100%	1,980,067,500	50%	6	1,142,537,685	100%	28.9%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Standar Pelayanan Minumum (SPM)	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	12	50%	6,496,350,000	50%	12	4,486,456,559	100%	34.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55	Operasional Terminal Alang-Alang Lebar dan Terminal Karya Jaya	Data Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal	Terpenuhinya fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal	25	50%	2,115,149,500	50%	25	1,717,689,186	100%	40.6%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	40	50%	17,500,000	50%	40	13,750,000	100%	39.3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1) Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang mendapatkan bantuan teknis	80	50%	1,735,000,000	50%	16	506,700,000	20.0%	14.6%	Capaian Output Sudah Optimal dab Capaian Anggaran Melebihi Target	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						2) Pemeliharaan perlengkapan Jalan	Data Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	50	50%	1,750,135,000	50%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						3) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	70	50%	10,322,925,000	50%	35	7,348,024,160	50.0%	35.6%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Merapi, UPPKB Talang Kelapa, dan UPPKB Kertapati	Data Pelanggaran UPPKB	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i>	8	8%	1,372,261,500	50%	7	1,251,489,895	87.5%	45.6%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	Laporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pekan keselamatan transportasi jalan	0	0%	175,000,000	50%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana

		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82	Pelaksanaan dan Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	30	40%	127,150,000	50%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1) Pengelolaan Bidang Ketatausahaan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	40	50%	2,548,256,000	50%	54	2,797,255,690	135.0%	54.9%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	-Seksi Lalin -Seksi Sarana -Subbag TU
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1) Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	40	50%	2,835,696,500	50%	47	2,717,420,263	117.5%	47.9%	Capaian Output sudah optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha
						2) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Layanan Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	40	50%	11,052,303,500	50%	72	16,042,821,174	180.0%	72.6%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-7				Realisasi Bulan-7		% Capaian Bulan-7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Bersentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Jumlah produksi per hari dan ritase	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	56	50%	1,770,676,250	58%	40	1,230,437,839	71.4%	40.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Data Realisasi Angkutan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minumum (SPM)	7	100%	7,579,075,000	58%	7	6,017,394,528	100%	46.3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Data Realisasi Pelabuhan SDP	Pemenuhan Standar Pelayanan Minumum (SPM)	6	100%	2,310,078,750	58%	6	1,706,155,565	100%	43.1%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Standar Pelayanan Minumum (SPM)	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minumum (SPM) di Terminal Tipe A	14	50%	7,579,075,000	58%	14	6,017,394,528	100%	46.3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55	Operasional Terminal Alang-Alang Lebar dan Terminal Karya Jaya	Data Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal	Terpenuhinya fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal	30	50%	2,467,674,417	58%	30	2,260,180,231	100%	53.4%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	46.66	50%	20,416,667	58%	40	13,750,000	86%	39.3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1) Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang mendapatkan bantuan teknis	80	50%	1,516,296,250	58%	46	1,216,080,000	57.5%	46.8%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						2) Pemeliharaan perlengkapan Jalan	Data Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	80	50%	2,041,824,167	58%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						3) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	80	50%	8,954,799,583	58%	49	7,553,414,160	61.3%	49.2%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)Merapi, UPPKB Talang Kelapa, dan UPPKB Kertapati	Data Pelanggaran UPPKB	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i>	9.33	8%	1,600,971,750	58%	9.33	1,313,296,076	100.0%	47.9%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	Laporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pekan keselamatan transportasi jalan	0	0%	204,166,667	58%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana

		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82	Pelaksanaan dan Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	35	40%	148,341,667	58%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1) Pengelolaan Bidang Ketatausahaan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	48	50%	2,972,965,333	58%	54	3,076,541,373	112.5%	60.4%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	-Seksi Lalin -Seksi Sarana -Subbag TU
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1) Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	48	50%	3,308,312,583	58%	60	3,440,684,804	125.0%	60.7%	Capaian Output sudah optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha
						2) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Layanan Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	48	50%	15,505,111,417	58%	74	19,884,721,697	154.2%	74.8%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-8				Realisasi Bulan-8		% Capaian Bulan-8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Jumlah produksi per hari dan ritase	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	64	67%	2,023,630,000	67%	48	1,464,445,984	75.0%	48.2%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	- Seksi Lalin - Seksi Sarana	
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Data Realisasi Angkutan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minumum (SPM)	7	100%	8,560,191,333	67%	7	6,761,215,993	100%	52.7%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana	
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Data Realisasi Pelabuhan SDP	Pemenuhan Standar Pelayanan Minumum (SPM)	6	100%	2,741,698,667	67%	6	1,916,023,078	100%	46.6%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana	
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Operasional Terminal Pemupang Tipe-A	Standar Pelayanan Minumum (SPM)	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minumum (SPM) di Terminal Tipe A	16	67%	8,560,191,333	67%	16	6,761,215,993	100%	52.7%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana	
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55	Operasional Terminal Alang-Alang Lebar dan Terminal Karya Jaya	Data Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal	Terpenuhinya fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal	35	67%	3,202,811,333	67%	35	2,523,617,470	100%	52.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana	
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	53.33	67%	23,333,333	67%	50	17,500,000	94%	50.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana	
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1)	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang mendapatkan bantuan teknis	80	67%	1,732,910,000	67%	69	1,808,157,000	86.3%	69.6%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						2)	Pemeliharaan perlengkapan Jalan	Data Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	80	67%	2,333,513,333	67%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
						3)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	80	67%	10,234,056,667	67%	70	10,778,420,000	87.5%	70.2%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)Merapi, UPPKB Talang Kelapa, dan UPPKB Kertapati	Data Pelanggaran UPPKB	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i>	10.66	11%	2,438,404,000	67%	10	1,497,158,976	93.8%	40.9%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin	

		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	Laporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pekan keselamatan transportasi jalan	0	0%	233,333,333	67%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82	Pelaksanaan dan Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpenuhiya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	40	53%	169,533,333	67%	0	0	0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1) Pengelolaan Bidang Ketatausahaan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana; Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	60	67%	3,690,901,333	67%	58	3,256,170,946	96.7%	58.8%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	-Seksi Lalin -Seksi Sarana -Seksi Prasarana -Subbag TU
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1) Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	60	67%	3,780,928,667	67%	65	3,694,611,970	108.3%	65.1%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Subbag Tata Usaha
						2) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Layanan Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	60	67%	19,618,474,000	67%	75	22,086,884,830	125.0%	75.1%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-9				Realisasi Bulan-9		% Capaian Bulan-9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Jumlah produksi ritase per bulan	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	72	75%	2,411,373,750	75%	55	1,782,342,554	76.4%	55.4%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Data Realisasi Produksi di Terminal Tipe A	Pelaksanaan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7	100%	9,630,215,250	75%	7	8,544,530,390	100.0%	66.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Data Realisasi Produksi di Pelabuhan SDP	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	100%	3,084,411,000	75%	6	2,529,763,701	100.0%	61.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Excellent Service Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	18	75%	652,272,000	75%	18	525,895,000	100.0%	60.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55	Operasional Terminal Alang-Alang Lebar dan Terminal Karya Jaya	Data Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal	Terpenuhinya fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal	40	75%	3,603,162,750	75%	40	3,218,035,582	100.0%	67.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	60	75%	26,250,000	75%	50	17,500,000	83.3%	50.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1) Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang mendapatkan bantuan teknis	80	75%	2,206,773,750	75%	80	2,599,157,000	100.0%	88.3%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Lalin
						2) Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	80	75%	768,255,000	75%	80	1,023,824,000	100.0%	99.9%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Lalin
						3) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	80	75%	15,111,858,750	75%	80	13,909,577,034	100.0%	69.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Lalin
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Data Pelanggaran UPPKB	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i>	12	12%	3,205,716,750	75%	12	2,851,948,411	100.0%	66.7%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	Laporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pekan keselamatan transportasi jalan	840	100%	350,000,000	100%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal, PKJ akan dilaksanakan pada Bulan Oktober	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana

		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82	Pelaksanaan dan Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	45	60%	190,725,000	75%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1) Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	68	75%	4,126,014,000	75%	62	3,420,934,038	91.2%	62.2%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	-Seksi Lalin -Seksi Sarana -Seksi Prasarana -Subbag TU
						2) Pelabuhan Sungai Prioritas Nasional; (Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru)	Data Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan	Tersedianya Pelabuhan Sungai Baru 1. Sungai Delta Upang 2. Sungai Salek	68	75%	22,424,250,000	75%	51	15,288,658,975	75.0%	51.1%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						3) Pengembangan Lingkungan Sistem Layanan Transportasi Darat	Data Dokumen Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Sungai Lumpur dan Karang Baru	Tersedianya Perangkat Sistem Layanan Transportasi Darat (Local Port Service)	68	75%	9,000,000,000	75%	57	6,835,194,690	83.8%	57.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						4) Pelabuhan Sungai di Rehabilitasi	Data Progres Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelabuhan yang di Rehabilitasi	68	75%	30,289,668,000	75%	34	14,052,935,629	50.0%	34.8%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						5) Tug Boat dan Kapal Patroli yang Dioperasikan	Data Realisasi Tug Boat dan Kapal Patroli	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Patroli	68	75%	2,001,765,750	75%	20	539,199,490	29.4%	20.2%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						6) Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	68	75%	450,000,000	75%	76	458,194,680	111.8%	76.4%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	
						7) Pengadaan Perangkat Pengelola Data dan Informasi (Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit)	Data Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Perangkat PPID Unit)	Tersedianya Perangkat Pengelola Data dan Informasi	68	75%	81,750,000	75%	98	107,348,000	144.1%	98.5%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1) Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	68	75%	4,253,544,750	75%	74	4,241,516,535	108.8%	74.8%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Subbag Tata Usaha
						2) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Layanan Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	68	75%	22,070,783,250	75%	82	24,162,374,387	120.6%	82.1%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-10				Realisasi Bulan-10		% Capaian Bulan-10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Jumlah produksi ritase per bulan	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	80	83%	2,679,304,167	83%	81.5	2,055,746,695	101.9%	63.9%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Data Realisasi Produksi di Terminal Tipe A	Pelaksanaan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7	100%	10,700,239,167	83%	7	9,862,869,619	100.0%	76.8%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Prasarana
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Data Realisasi Produksi di Pelabuhan SDP	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	100%	3,427,123,333	83%	6	2,982,435,698	100.0%	72.5%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Excellent Service Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minumum (SPM)	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minumum (SPM) di Terminal Tipe A	20	83%	724,746,667	83%	28.59	654,795,000	143.0%	75.3%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Prasarana
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55	Operasional Terminal Alang Alang Lebar dan Terminal Karya Jaya	Data Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal	Terpenuhinya fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal	45	83%	4,003,514,167	83%	51.42	3,775,712,891	114.3%	78.6%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Prasarana
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	66.6	83%	29,166,667	83%	60.5	21,250,000	90.8%	60.7%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Prasarana
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1) Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang mendapatkan bantuan teknis	80	83%	2,942,365,000	100%	79.1	2,599,157,000	98.9%	88.3%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Lalin
						2) Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	80	83%	1,024,340,000	100%	79.1	1,023,824,000	98.9%	99.9%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Lalin
						3) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	80	83%	20,149,145,000	100%	79.1	14,208,377,034	98.9%	70.5%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Lalin
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Data Pelanggaran UPPKB	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i>	13.33	13%	3,561,907,500	83%	16.85	3,269,691,310	126.4%	76.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	Laporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pekan keselamatan transportasi jalan	840	100%	350,000,000	100%	1300	326,531,647	154.8%	93.3%	Capaian Output Belum Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Sarana
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	82	1 Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Data Pelaksanaan Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	50	67%	211,916,667	83%	0	0	0.0%	0.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
						2 Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan	Data Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	50	67%	480,833,333	83%	70.58	385,734,488	141.2%	66.9%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana

4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1)	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	75	83%	4,103,626,667	83%	75.06	3,378,859,185	100.1%	68.6%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	-Seksi Lalin -Seksi Sarana -Subbag TU
						2	Pelabuhan Sungai Prioritas Nasional; (Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru)	Data Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan	Tersedianya Pelabuhan Sungai Baru 1. Sungai Delta Upang 2. Sungai Salek	75	83%	24,915,833,333	83%	63	18,879,290,807	84.0%	63.1%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						3	Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Data Dokumen Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Sungai Lumpur dan Karang Baru	Tersedianya Perangkat Sistem Layanan Transportasi Darat (Local Port Service)	75	83%	10,000,000,000	83%	97	11,675,777,603	129.3%	97.3%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	
						4	Pelabuhan Sungai di Rehabilitasi	Data Progres Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelabuhan yang di Rehabilitasi	75	83%	33,655,186,667	83%	49	19,979,012,429	65.3%	49.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						5	Tug Boat dan Kapal Patroli yang Dioperasikan	Data Realisasi Tug Boat dan Kapal Patroli	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Patroli	75	83%	2,224,184,167	83%	23	617,359,420	30.7%	23.1%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						6	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	75	83%	500,000,000	83%	76	458,194,680	101.3%	76.4%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	
						7	Pengadaan Perangkat Pengelola Data dan Informasi (Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit)	Data Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Perangkat PPID	Tersedianya Perangkat Pengelola Data dan Informasi	75	83%	90,833,333	83%	98	107,348,000	130.7%	98.5%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1)	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	75	83%	4,726,160,833	83%	79	4,486,372,417	105.3%	79.1%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Subbag Tata Usaha
						2)	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Layanan Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	75	83%	24,523,092,500	83%	79	26,277,341,118	105.3%	89.3%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-11				Realisasi Bulan-10		% Capaian Bulan-10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Jumlah produksi ritase per bulan	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	90	92%	2,947,234,583	92%	91	2,326,571,392	101.1%	72.4%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Data Realisasi Produksi di Terminal Tipe A	Pelaksanaan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7	100%	11,770,263,083	92%	7	11,813,678,702	100.0%	92.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Prasarana
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Data Realisasi Produksi di Pelabuhan SDP	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	100%	3,769,835,667	92%	6	3,633,933,498	100.0%	88.4%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Excellent Service Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minumum (SPM)	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minumum (SPM) di Terminal Tipe A	22	92%	797,221,333	92%	28.59	762,245,000	130.0%	87.6%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Prasarana
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55	Operasional Terminal Alang Alang Lebar dan Terminal Karya Jaya	Data Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal	Terpenuhinya fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal	50	92%	4,403,865,583	92%	51.42	4,541,860,924	102.8%	94.5%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Prasarana
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	55	92%	32,083,333	92%	60.5	35,000,000	110.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Prasarana
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1) Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang mendapatkan bantuan teknis	80	92%	2,942,365,000	100%	80	2,599,157,000	100.0%	88.3%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Lalin
						2) Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	80	92%	1,024,340,000	100%	80	1,023,824,000	100.0%	99.9%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Lalin
						3) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	80	92%	20,149,145,000	100%	80	14,208,377,034	100.0%	70.5%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Lalin
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Data Pelanggaran UPPKB	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i>	14.66	15%	3,918,098,250	92%	16.85	3,857,322,677	114.9%	90.2%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Lalin
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	Laporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pekan keselamatan transportasi jalan	840	100%	350,000,000	100%	1300	340,416,647	154.8%	97.3%	Capaian Output Belum Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Sarana
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan	%	82	1 Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Data Pelaksanaan Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	60	73%	233,108,333	92%	80	248,295,123	133.3%	97.6%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana

			Uji Berkala Kendaraan Bermotor			2	Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan	Data Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	60	73%	528,916,667	92%	70.58	472,871,153	117.6%	82.0%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	Seksi Sarana
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1)	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	80	92%	4,513,989,333	92%	90	3,757,742,214	112.5%	76.3%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	-Seksi Lalin -Seksi Sarana -Seksi Prasarana -Subbag TU
						2	Pelabuhan Sungai Prioritas Nasional; (Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru)	Data Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan	Tersedianya Pelabuhan Sungai Baru 1. Sungai Delta Upang 2. Sungai Salek	80	92%	27,407,416,667	92%	90	22,821,482,080	112.5%	76.3%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						3	Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Data Dokumen Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Sungai Lumpur dan Karang Baru	Tersedianya Perangkat Sistem Layanan Transportasi Darat (Local Port Service)	80	92%	11,000,000,000	92%	90	11,891,291,203	112.5%	99.1%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	
						4	Pelabuhan Sungai di Rehabilitasi	Data Progres Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelabuhan yang di Rehabilitasi	80	92%	37,020,705,333	92%	58	23,680,093,508	72.5%	58.6%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						5	Tug Boat dan Kapal Patroli yang Dioperasikan	Data Realisasi Tug Boat dan Kapal Patroli	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Patroli	80	92%	2,446,602,583	92%	30	815,030,383	37.5%	30.5%	Capaian Output Belum Optimal	Melakukan persiapan teknis dan administrasi secara intensif	
						6	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	80	92%	550,000,000	92%	90	552,840,217	112.5%	92.1%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	
						7	Pengadaan Perangkat Pengelola Data dan Informasi (Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit)	Data Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Perangkat PPIID	Tersedianya Perangkat Pengelola Data dan Informasi	80	92%	99,916,667	92%	90	107,348,000	112.5%	98.5%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1)	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	80	92%	5,198,776,917	92%	80	5,039,224,351	100.0%	88.9%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Subbag Tata Usaha
						2)	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Layanan Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	80	92%	26,975,401,750	92%	80	27,404,342,392	100.0%	93.1%	Capaian Output Sudah Optimal dan Capaian Anggaran Melebihi Target	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-12				Realisasi Bulan-12		% Capaian Bulan-12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumsel	Jumlah produksi ritase per bulan	Terpenuhinya pelayanan angkutan perintis yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum	100	100%	3,215,165,000	100%	100	3,215,165,000	100.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Data Realisasi Produksi di Terminal Tipe A	Pelaksanaan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7	100%	12,840,287,000	100%	7	12,840,287,000	100.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Prasarana
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Data Realisasi Produksi di Pelabuhan SDP	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	100%	4,112,548,000	100%	6	4,112,548,000	100.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Prasarana
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	Excellent Service Terminal Tipe A	Standar Pelayanan Minumum (SPM)	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minumum (SPM) di Terminal Tipe A	25	100%	869,696,000	100%	28.59	869,696,000	114.4%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Prasarana
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55	Operasional Terminal Alang Alang Lebar dan Terminal Karya Jaya	Data Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal	Terpenuhinya fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal	55	100%	4,804,217,000	100%	55	4,804,217,000	100.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Prasarana
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	60	Pelaksanaan Pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan SDP	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	60	100%	35,000,000	100%	60.5	35,000,000	100.8%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Prasarana
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1) Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang mendapatkan bantuan teknis	80	100%	2,942,365,000	100%	80	2,942,365,000	100.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Lalin
						2) Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan		100%	1,024,340,000	100%	80	1,024,340,000	#DIV/0!	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Lalin
						3) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prov. Sumsel	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan		100%	20,149,145,000	100%	80	20,149,145,000	#DIV/0!	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Lalin
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	Data Pelanggaran UPPKB	Berkurangnya pelanggaran kendaraan <i>Over Dimension and Over Loading (ODOL)</i>	16	16%	4,274,289,000	100%	16.85	4,274,289,000	105.3%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Lalin
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	Laporan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pekan keselamatan transportasi jalan	840	100%	350,000,000	100%	1300	350,000,000	154.8%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Sarana
		IKK7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan	%	82	1 Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Data Pelaksanaan Perawatan dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	82	80%	254,300,000	100%	82	254,300,000	100.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Sarana

			Uji Berkala Kendaraan Bermotor			2	Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan	Data Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor		80%	577,000,000	100%	82	577,000,000	100.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Seksi Sarana
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1)	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	90	100%	4,924,352,000	100%	90	4,924,352,000	100.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	-Seksi Lalin -Seksi Sarana -Seksi Prasarana -Subbag TU
						2	Pelabuhan Sungai Prioritas Nasional; (Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru)	Data Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan	Tersedianya Pelabuhan Sungai Baru 1. Sungai Delta Upang 2. Sungai Salek		100%	29,899,000,000	100%	90	29,899,000,000	100.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	
						3	Pengembangan Sistem Layanan Transportasi Darat	Data Dokumen Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Sungai Lumpur dan Karang Baru	Tersedianya Perangkat Sistem Layanan Transportasi Darat (Local Port Service)		100%	12,000,000,000	100%	90	12,000,000,000	100.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	
						4	Pelabuhan Sungai di Rehabilitasi	Data Progres Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pelabuhan yang di Rehabilitasi		100%	40,386,224,000	100%	90	40,386,224,000	100.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	
						5	Tug Boat dan Kapal Patroli yang Dioperasikan	Data Realisasi Tug Boat dan Kapal Patroli	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Patroli		100%	2,669,021,000	100%	90	2,669,021,000	100.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	
						6	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran	Tersedianya Laporan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana		100%	600,000,000	100%	90	600,000,000	100.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	
						7	Pengadaan Perangkat Pengelola Data dan Informasi (Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit)	Data Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Perangkat PPID	Tersedianya Perangkat Pengelola Data dan Informasi		100%	109,000,000	100%	90	109,000,000	100.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1)	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	85	100%	5,671,393,000	100%	85	5,671,393,000	100.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Subbag Tata Usaha
						2)	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Layanan Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran		100%	29,427,711,000	100%	85	29,427,711,000	100.0%	100.0%	Capaian Output Telah Optimal	Mempertahankan progress pelaksanaan kegiatan	Subbag Tata Usaha